



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

## Pengadilan Negeri Pangkalan Bun





## **KATA PENGANTAR**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 merupakan bentuk uraian pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025, meliputi bidang teknis dan non teknis, pengawasan internal, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan serta pengelolaan teknologi informasi. Disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025. Selain memberikan informasi perihal pelaksanaan kinerja, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 juga sebagai bahan evaluasi dan perencanaan di masa mendatang agar kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjadi lebih baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Laporan ini disusun secara optimal dan sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Apabila masih ditemukan hambatan dalam penyelesaiannya, maka akan diperbaiki dalam proses evaluasi berlanjut supaya dapat meningkatkan prestasi kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara berjenjang kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya serta diharapkan bisa bermanfaat bagi kalangan internal Pengadilan Negeri Pangkalan Bun maupun masyarakat.

Pangkalan Bun, 15 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



Ikha Tina, S.H., M.Hum.

## PRESTASI DAN PENGHARGAAN

### PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TAHUN 2025



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh Piagam Penghargaan Peringkat Ketiga atas Optimalisasi Aset dari Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2024. Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja dalam pengelolaan serta pemanfaatan aset negara secara optimal dan akuntabel.



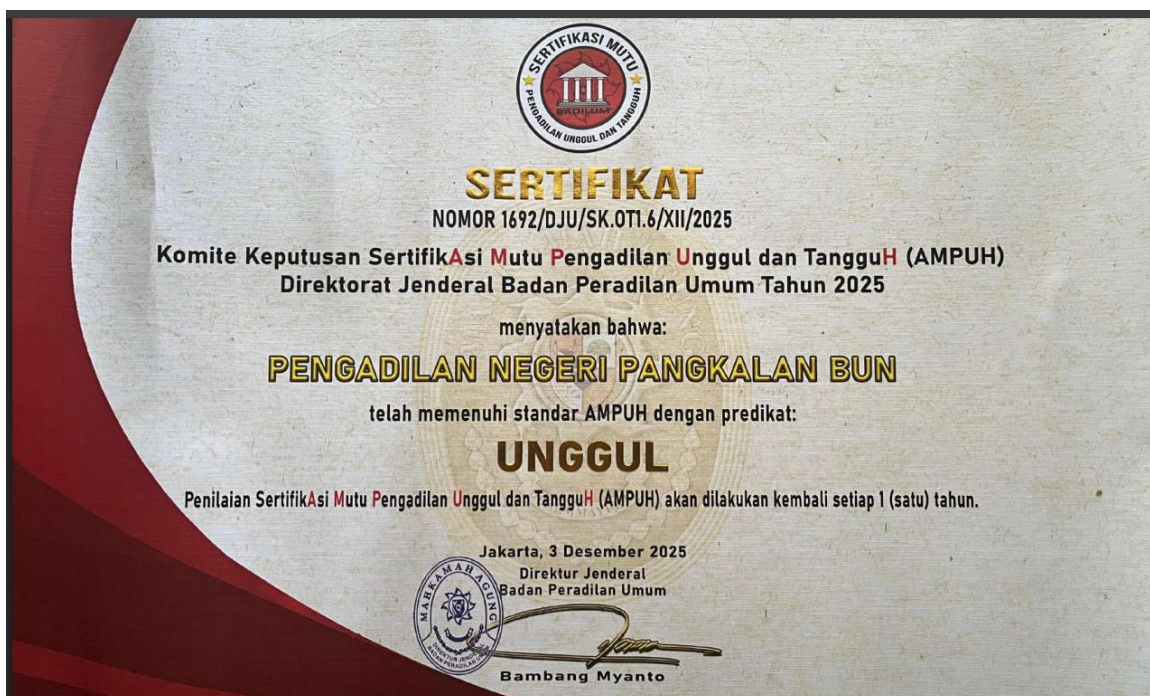
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh Piagam Penghargaan atas Pencapaian Nilai Sempurna IKPA kategori Pagu Kecil dengan Bobot Besar pada Semester I Tahun Anggaran 2025. Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan.



Pada Semester I Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil memperoleh penghargaan IKPA dengan nilai sempurna pada kategori Pagu Kecil bobot kecil. Capaian ini mencerminkan ketepatan perencanaan serta kepatuhan satuan kerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana diapresiasi oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah.



Sepanjang Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Menunjukkan Kinerja Pengelolaan Anggaran Yang Optimal Dengan Meraih Nilai Sempurna IKPA Pada Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil. Pencapaian Ini Menegaskan Komitmen Satuan Kerja Dalam Menjaga Kualitas Pelaksanaan Anggaran Yang Disiplin, Terukur, Dan Sesuai Ketentuan Perbendaharaan.



Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan Sertifikat Unggul pada Penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Tahun 2025. Ditandatangani langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Piagam Penghargaan .....	iii
Daftar Isi .....	vii
Bab I Pendahuluan .....	1
Bab II Keadaan Perkara .....	4
A. Keadaan Perkara .....	4
• Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	4
• Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	17
• Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	17
• Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .....	17
B. Penyelesaian Perkara .....	18
• Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu .....	18
• Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali .....	18
• Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif .....	19
• Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi .....	19
• Perkara Anak yang Berhasil Diselesaikan melalui Diversi .....	19
• Perkara Perdata yang Menggunakan e- Court .....	20
• Perkara Pidana yang Dilimpahkan secara Elektronik (e- Berpadu) .....	21
• Perkara Pidana yang Diajukan secara Elektronik (e- berpadu) .....	21

C. Program Prioritas Nasional .....	24
• Posbakum .....	24
• Sidang Keliling.....	25
Bab III SDM, Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan, Golongan/ Pendidikan .....	28
A. Mutasi .....	28
B. Promosi .....	29
C. Pensiun .....	30
D. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti diklat) .	30
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi .....	38
A. Pengelolaan Keuangan .....	38
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	39
C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....	57
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik .....	62
A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan .....	62
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	63
C. Inovasi Pelayanan Publik .....	63
Bab VI Pengawasan .....	77
A. Internal .....	77
B. Evaluasi .....	80
Bab VII Penutup .....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Rekomendasi .....	81

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Kebijakan Umum Peradilan

Peradilan di Indonesia memasuki era reformasi yang berbasis teknologi serta dituntut untuk lebih transparan dan profesional dibidang hukum, dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang. Perbaikan tersebut diharapkan dapat membuat lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dimata masyarakat umum tidak lagi menakutkan, akan tetapi menjadi pelindung dan pengayom masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dalam Agenda Pembaruannya, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berfokus pada pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dalam bentuk :

1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yakni pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
2. Pelaksanaan Pelayanan PTSP Online yakni layanan PTSP secara online berbasis *video conference* via *whatsapp* sehingga dapat diakses oleh masyarakat dari mana saja.
3. Penerapan aplikasi *e-Court* dengan fitur *e-filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), *e-summons* (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Melalui aplikasi *e-Court* pendaftar gugatan permohonan dari seorang advokat saja tanpa harus datang ke pengadilan. Penerapan Elektronik juga dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan yakni melalui *e-Litigasi*. Sistem *e-Litigasi* memudah pelaksanaan proses persidangan secara elektronik yang memuat dokumen persidangan (gugatan, permohonan, persetujuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan), pembuktian dan pengucapan putusan dilaksanakan secara elektronik.
4. Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
5. Sebagai upaya peningkatan kualitas Pelayanan publik, pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempertahankan perolehan Pembangunan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi yang telah diperoleh pada tahun 2021.

## B. Visi dan Misi

### a. Visi

Dengan tetap menyelaraskan pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**” maka ditetapkan visi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB sebagaimana yaitu “**Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Yang Agung**”.

### b. Misi

Untuk mencapai misi tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan .
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

### c. Rencana Strategis

Untuk memperjelas arah tujuan yang ingin dicapai maka tujuan merupakan implementasi dari misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2025-2029, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB merumuskan Rencana Strategis :

1. Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

## BAB II

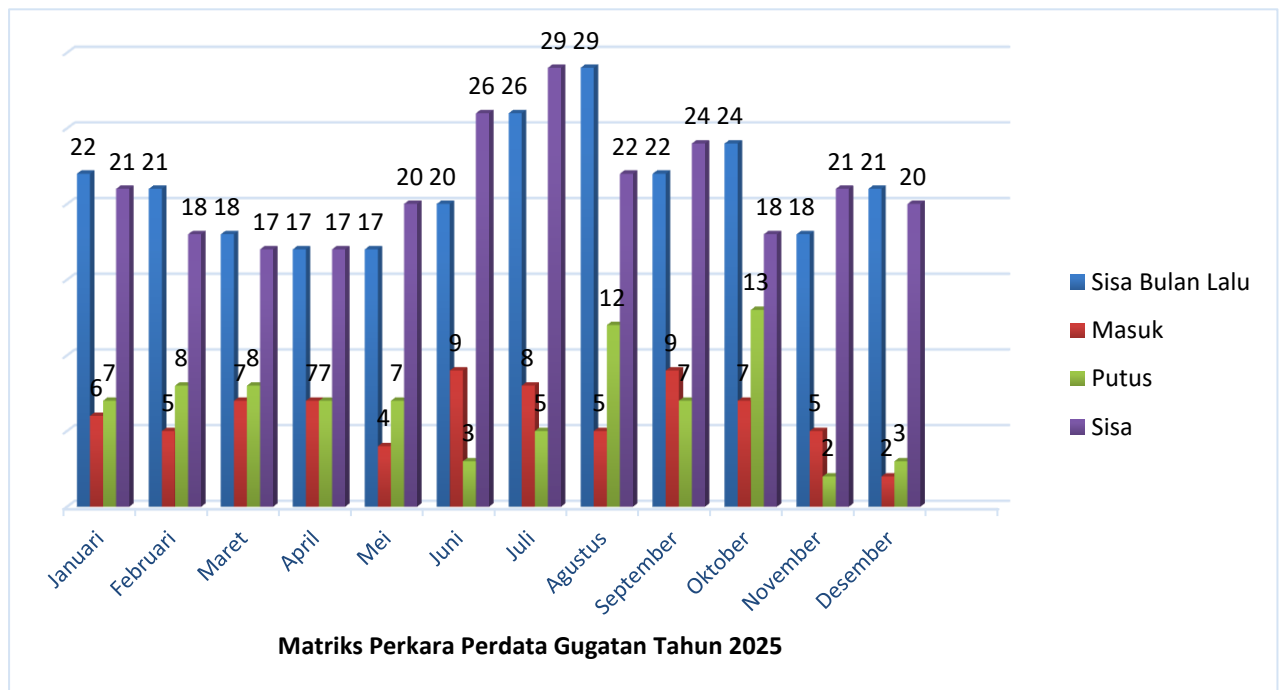
### Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara, dan Capaian Prioritas Nasional

#### A. Keadaan Perkara

##### 1. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan salah satu Pengadilan Negeri Pertama dibawah Lingkungan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang berwenang mengadili perkara tingkat pertama di Wilayah Kalimantan Tengah. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengadili perkara pidana, pidana anak, dan perkara perdata. Selama tahun 2025 perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebanyak 598 perkara yang terdiri dari perkara pidana sebanyak 394 perkara atau 65,88% termasuk dengan pidana cepat dan pidana anak, perdata sebanyak 204 perkara atau 51,77% dari total perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selama tahun 2025.

##### a) Matriks Perkara Perdata Gugatan Tahun 2025



<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>SISA BULAN LALU</b>	<b>MASUK</b>	<b>MINUTASI</b>	<b>SISA</b>
1	Januari	22	6	7	21
2	Februari	21	5	8	18
3	Maret	18	7	8	17
4	April	17	7	7	17
5	Mei	17	4	7	20
6	Juni	20	9	3	26
7	Juli	26	8	5	29
8	Agustus	29	5	12	22
9	September	22	9	7	24
10	Oktober	24	7	13	18
11	November	18	5	2	21
12	Desember	21	3	4	20
<b>JUMLAH</b>			75	83	12

#### Keterangan Perkara Gugatan

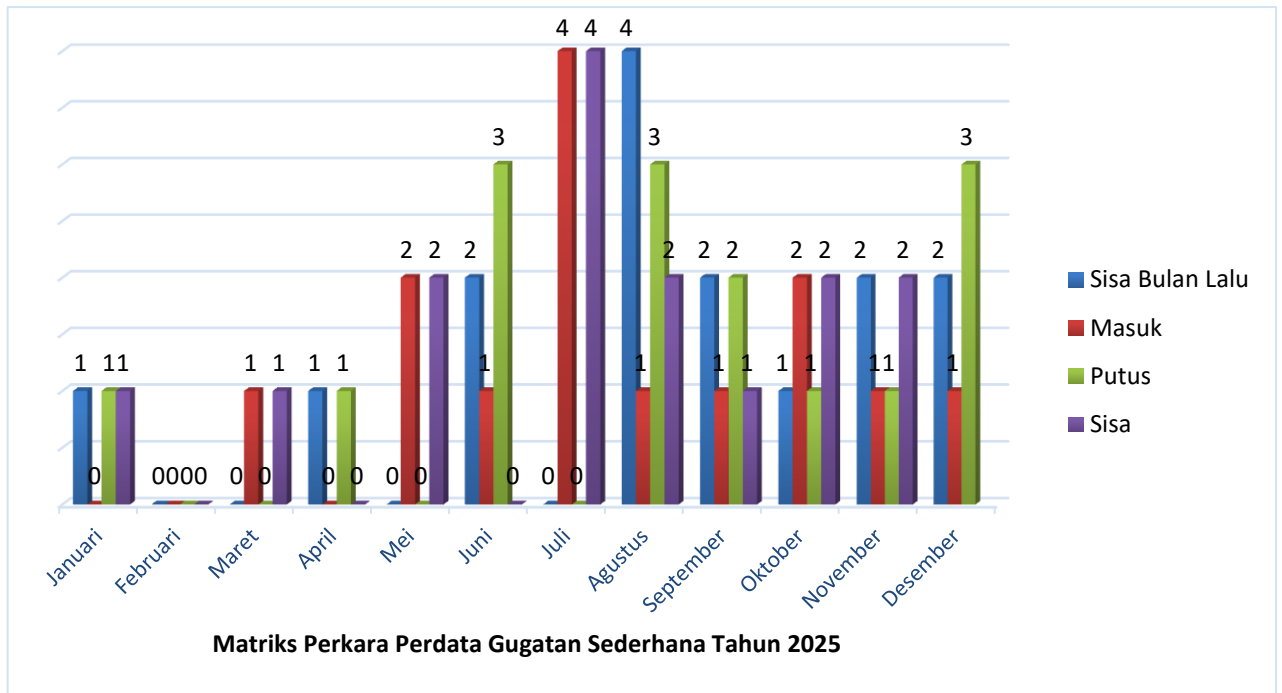
Sisa Tahun 2024 : 22

Masuk Tahun 2025 : 75

Minutasi Tahun 2025 : 83

Sisa Belum Minutasi : 12

## b) Matriks Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2025



NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	1	0	1	0
2	Februari	0	0	0	0
3	Maret	0	1	0	1
4	April	1	0	1	0
5	Mei	0	2	0	2
6	Juni	2	1	3	0
7	Juli	0	4	0	4
8	Agustus	4	1	3	2
9	September	2	1	2	1
10	Oktober	1	2	1	2
11	November	2	1	1	2
12	Desember	2	1	3	0
<b>JUMLAH</b>			13	15	0

Keterangan Perkara Gugatan Sederhana

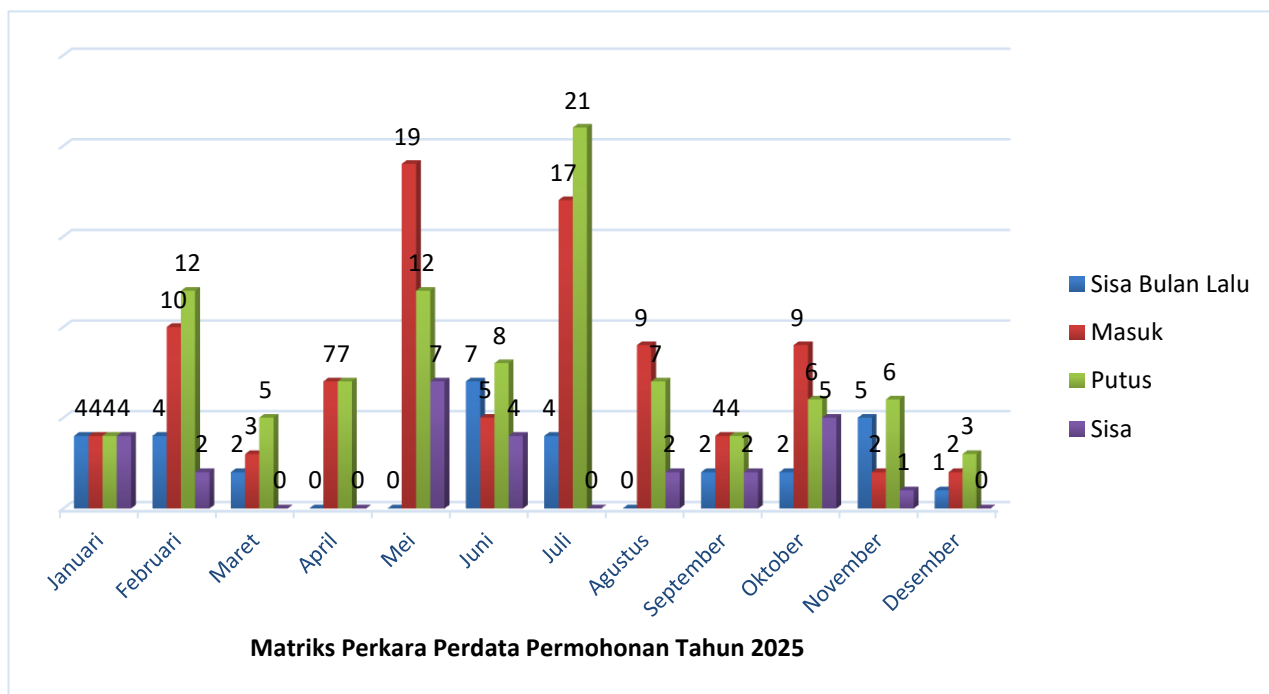
Sisa Tahun 2024 : 1

Masuk Tahun 2025 : 13

Minutasi Tahun 2025 : 15

Sisa Belum Minutasi : 0

**c) Matriks Perkara Perdata Permohonan Tahun 2025**



NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	4	4	4	4
2	Februari	4	10	12	2
3	Maret	2	3	5	-
4	April	-	7	7	-
5	Mei	-	19	12	7
6	Juni	7	5	8	4
7	Juli	4	17	21	-
8	Agustus	-	9	7	2
9	September	2	4	4	2
10	Oktober	2	9	6	5
11	November	5	2	6	1
12	Desember	1	2	3	0
<b>JUMLAH</b>			91	95	0

### Keterangan Perkara Perdata Permohonan

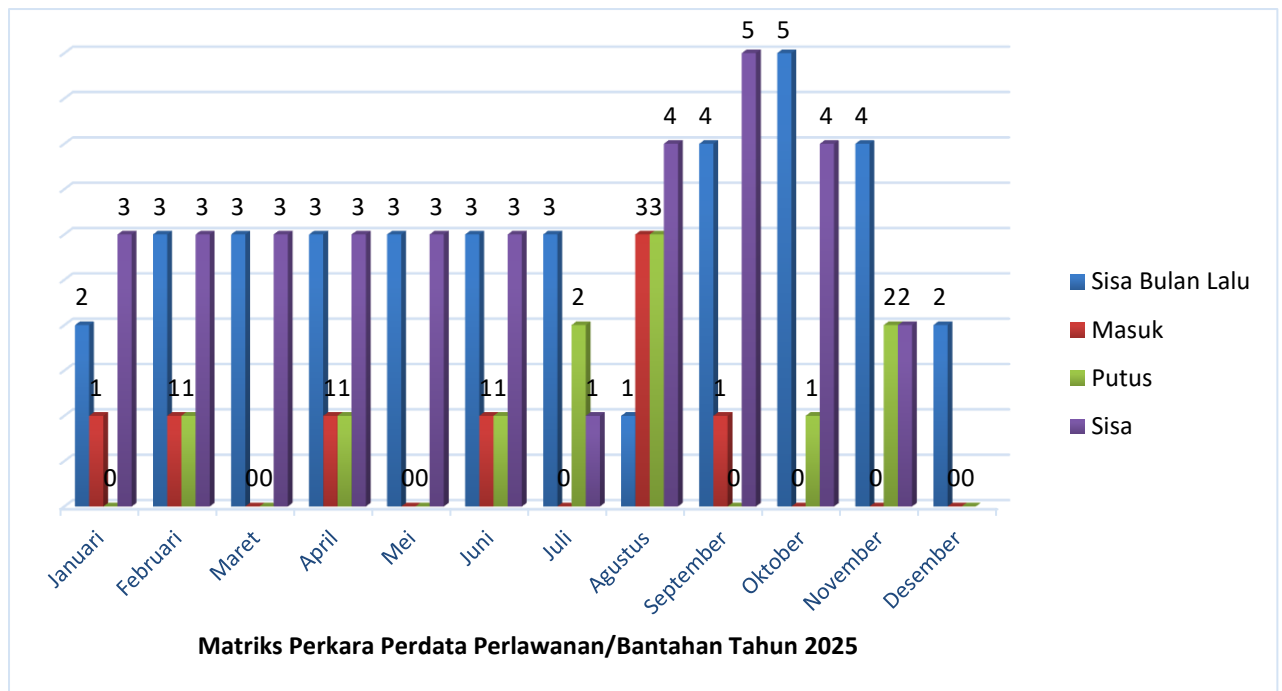
Sisa Tahun 2024 : 4

Masuk Tahun 2025 : 91

Minutasi Tahun 2025 : 95

Sisa Belum Minutasi : 0

#### d) Matriks Perkara Perdata Perlawanan/Bantahan Tahun 2025



NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	2	1	-	3
2	Februari	3	1	1	3
3	Maret	3	-	-	3
4	April	3	1	1	3
5	Mei	3	-	-	3
6	Juni	3	1	1	3
7	Juli	3	-	2	1
8	Agustus	1	3	3	4
9	September	4	1	-	5
10	Oktober	5	-	1	4

<b>11</b>	November	4	-	2	2
<b>12</b>	Desember	2	0	0	2
<b>JUMLAH</b>			8	11	2

#### Keterangan Perkara Perdata Perlawanan

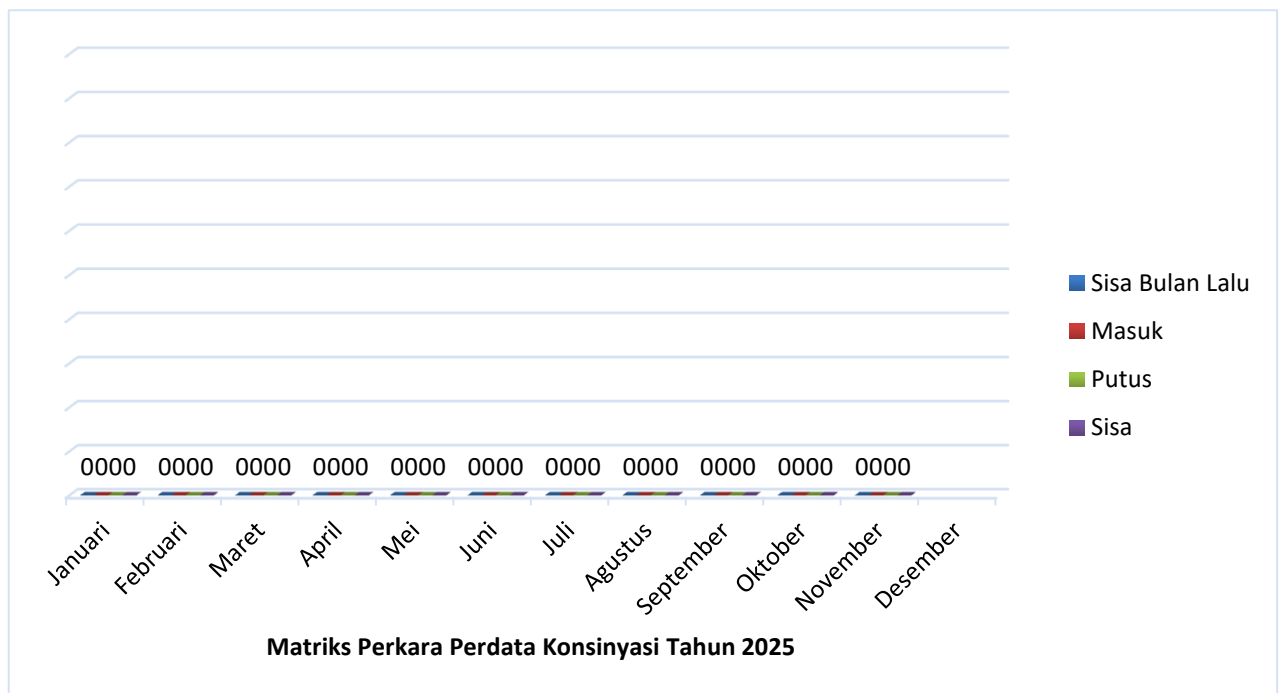
Sisa Tahun 2024 : 2

Masuk Tahun 2025 : 8

Minutasi Tahun 2025 : 11

Sisa Belum Minutasi : 2

#### e) Matriks Perkara Perdata Konsinyasi Tahun 2025



<b>NO</b>	<b>BULAN</b>	<b>SISA BULAN LALU</b>	<b>MASUK</b>	<b>MINUTASI</b>	<b>SISA</b>
<b>1</b>	Januari	-	-	-	-
<b>2</b>	Februari	-	-	-	-
<b>3</b>	Maret	-	-	-	-
<b>4</b>	April	-	-	-	-

5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			0	0	0

#### Keterangan Perkara Perdata Konsinyasi

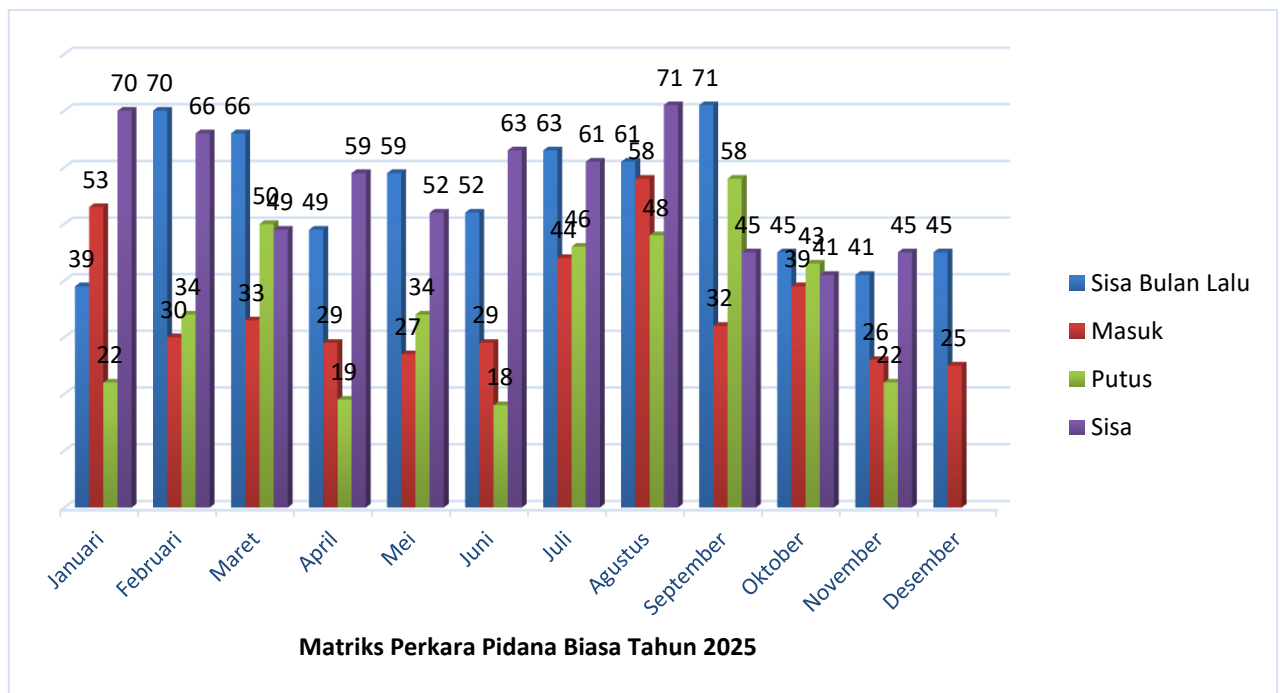
Sisa Tahun 2024 : 0

Masuk Tahun 2025 : 0

Minutasi Tahun 2025 : 0

Sisa Belum Minutasi : 0

#### f) Matriks Perkara Pidana Biasa Tahun 2025



NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	39	53	22	70
2	Februari	70	30	34	66
3	Maret	66	33	50	49
4	April	49	29	19	59
5	Mei	59	27	34	52
6	Juni	52	29	18	63
7	Juli	63	44	46	61
8	Agustus	61	58	48	71
9	September	71	32	58	45
10	Oktober	45	39	43	41
11	November	41	26	22	45
12	Desember	45	44	44	45
<b>JUMLAH</b>			444	352	45

Keterangan Perkara Pidana Biasa

Sisa Tahun 2024 : 39

Masuk Tahun 2025 : 444

Minutasi Tahun 2025 : 352

Sisa Belum Minutasi : 45

**g) Matriks Perkara Pidana Singkat Tahun 2025**



NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September				
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			0	0	0

Keterangan Perkara Pidana Singkat

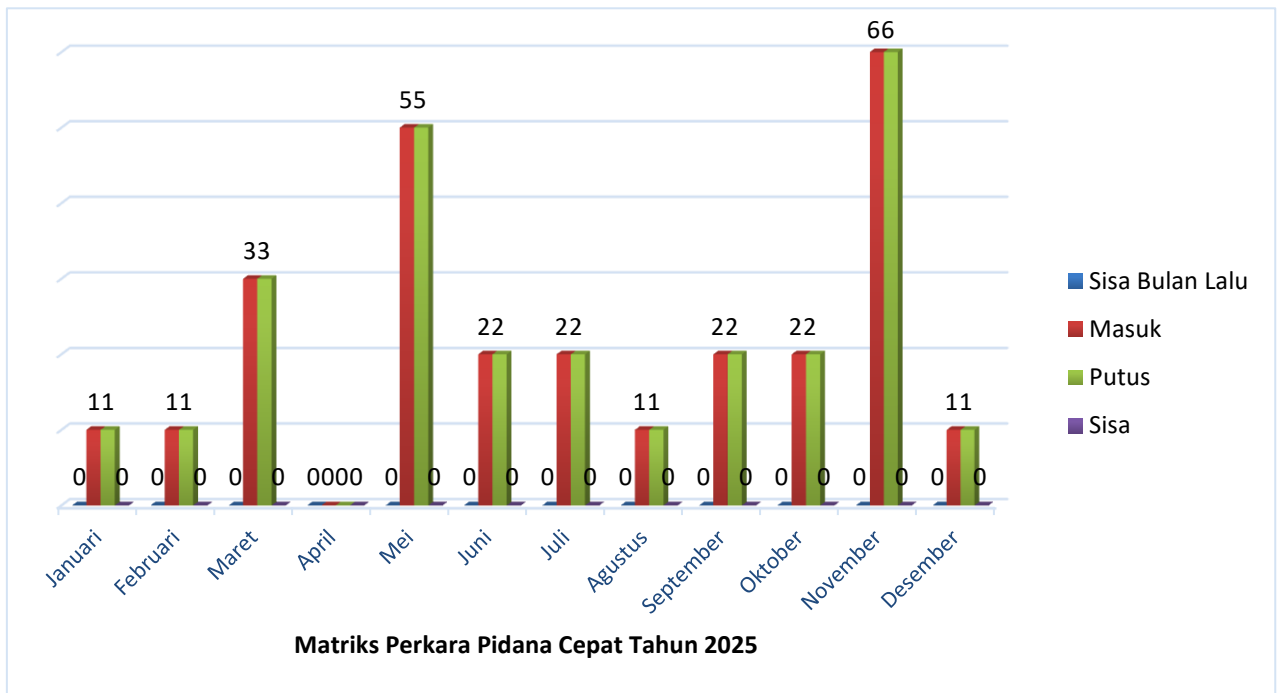
Sisa Tahun 2024 : 0

Masuk Tahun 2025 : 0

Minutasi Tahun 2025 : 0

Sisa Belum Minutasi : 0

## h) Matriks Perkara Pidana Cepat Tahun 2025



NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	-	1	1	-
2	Februari	-	1	1	-
3	Maret	-	3	3	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	5	5	-
6	Juni	-	2	2	-
7	Juli	-	2	2	-
8	Agustus	-	1	1	-
9	September	-	2	2	-
10	Oktober	-	2	2	-
11	November	-	6	6	-
12	Desember	-	1	1	-
<b>JUMLAH</b>			26	26	-

### Keterangan Perkara Pidana Cepat

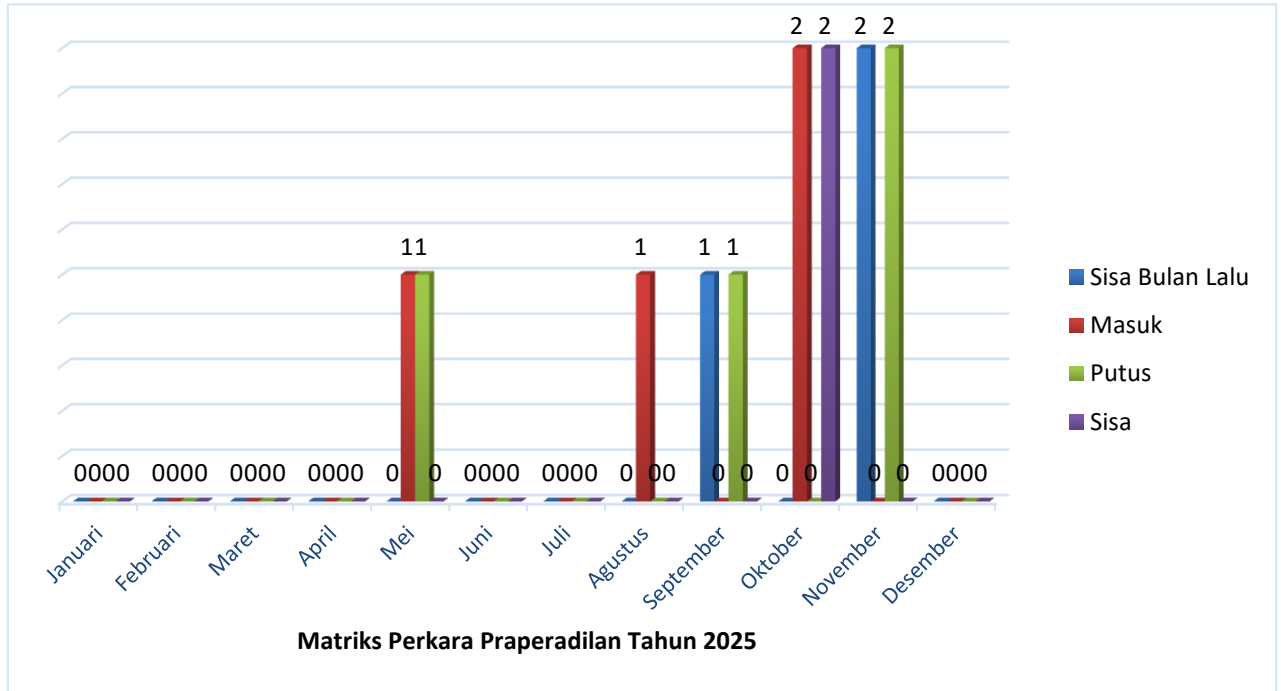
Sisa Tahun 2024 : 0

Masuk Tahun 2025 : 26

Minutasi Tahun 2025 : 26

Sisa Belum Mutasi : 0

**i) Matriks Perkara Praperadilan Tahun 2025**



NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	1	1	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	1	-	-
9	September	1	-	1	-
10	Oktober	-	2	-	2
11	November	2	-	2	-
12	Desember	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>			4	4	0

## Keterangan Perkara Praperadilan

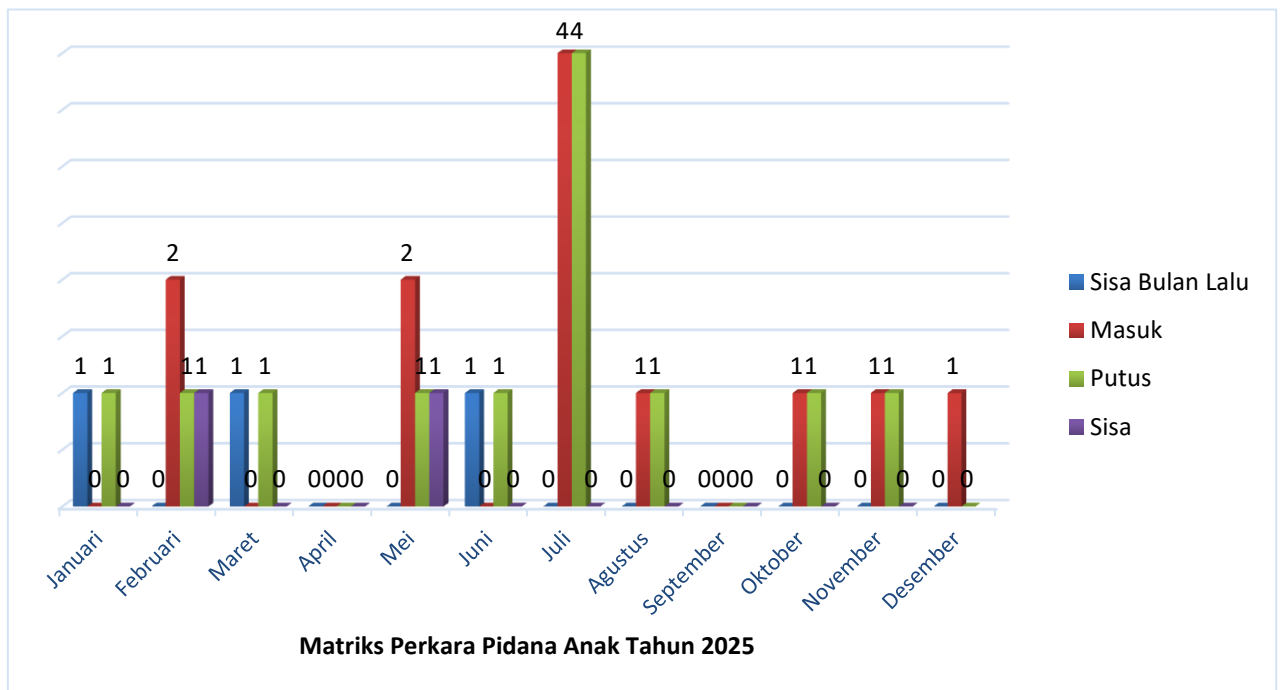
Sisa Tahun 2024 : 0

Masuk Tahun 2025 : 4

Minutasi Tahun 2025 : 4

Sisa Belum Minutasi : 0

## j) Matriks Perkara Pidana Anak Tahun 2025



NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	1	-	1	-
2	Februari	-	2	1	1
3	Maret	1	-	1	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	2	1	1
6	Juni	1	-	1	-
7	Juli	-	4	4	-
8	Agustus	-	1	1	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	1	1	-

11	November	-	1	1	-
12	Desember	-	1	-	1
<b>JUMLAH</b>			12	12	1

#### Keterangan Perkara Pidana Anak

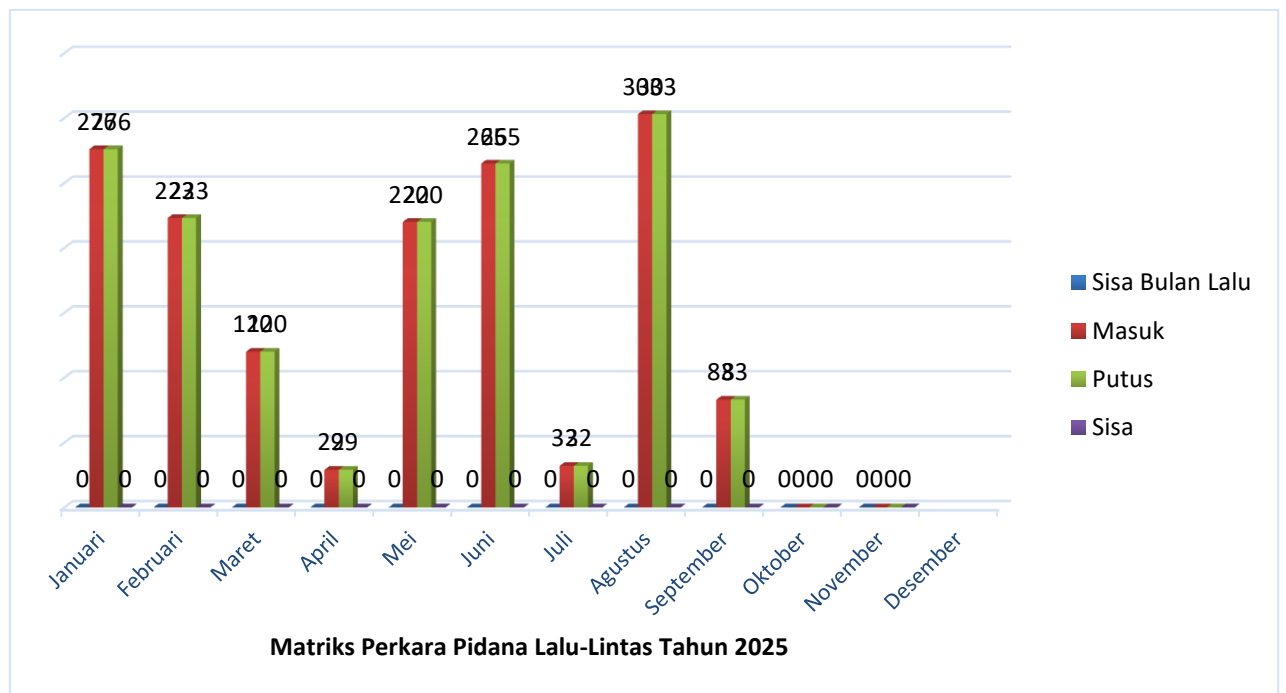
Sisa Tahun 2024 : 1

Masuk Tahun 2025 : 12

Minutasi Tahun 2025 : 12

Sisa Belum Minutasi : 1

#### k) Matriks Perkara Pidana Lalu-Lintas Tahun 2025



NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	-	276	276	-
2	Februari	-	223	223	-
3	Maret	-	120	120	-
4	April	-	29	29	-
5	Mei	-	220	220	-

6	Juni	-	265	265	-
7	Juli	-	32	32	-
8	Agustus	-	303	303	-
9	September	-	83	83	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	23	23	-
<b>JUMLAH</b>			438	438	0

#### Keterangan Perkara Pidana Lalu-Lintas

Sisa Tahun 2024 : 0

Masuk Tahun 2025 : 438

Minutasi Tahun 2025 : 438

Sisa Belum Minutasi : 0

#### 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

NO	PERKARA	PERMOHONAN BANDING	PENGIRIMAN BERKAS	PUTUSAN PT	BELUM PUTUSAN PT
1	Perdata	9	9	8	1
2	Pidana	140	115	115	25
3	Pidana Anak	6	6	6	0

#### 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

NO	PERKARA	PERMOHONAN KASASI	PENGIRIMAN BERKAS	PUTUSAN MA	BELUM PUTUSAN MA
1	Perdata	0	0	0	0
2	Pidana	137	115	95	42
3	Pidana Anak	8	5	5	3

#### 4. Keadaan Perkara Tingkat Peningjauan Kembali

NO	PERKARA	PERMOHONAN PK	PENGIRIMAN BERKAS	PUTUSAN MA	BELUM PUTUSAN MA
1	Gugatan	4	4	3	1

2	Pidana Biasa	2	2	2	0
---	--------------	---	---	---	---

## B. Penyelesaian Perkara

### 1. Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu

NO	PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU (2024)	PUTUS 2025	SISA 2025
1	Perdata Gugatan	22	83	12
2	Perdata Gugatan Sederhana	1	15	0
3	Perdata Permohonan	4	95	0
4	Perdata Permohonan/Bantahan	2	11	2
5	Pidana Biasa	39	352	45
6	Pidana Singkat	0	0	0
7	Pidana Cepat	0	26	26
8	Pidana Anak	1	12	1

NO	PERKARA	SISA TAHUN 2024	MASUK	PUTUS (< 5 BULAN)	PUTUS (> 5 BULAN)
1	Perdata Gugatan	22	75	83	0
2	Perdata Gugatan Sederhana	1	13	15	0
3	Perdata Permohonan	4	91	95	0
4	Perdata Permohonan/Bantahan	2	8	11	0
5	Pidana Biasa	39	444	352	0
6	Pidana Singkat	0	0	0	0
7	Pidana Cepat	0	26	26	0
8	Pidana Anak	1	12	12	0

### 2. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

#### a) Keadaan Perkara Tingkat Banding

NO	PERKARA	PUTUSAN PN	BANDING	TIDAK BANDING
1	Perdata	197	9	188
2	Pidana	352	112	240

3	Pidana Anak	12	6	6
---	-------------	----	---	---

**b) Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

NO	PERKARA	PUTUSAN PN	KASASI	TIDAK KASASI
1	Perdata	0	0	197
2	Pidana	95	109	243
3	Pidana Anak	12	5	7

**c) Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali**

NO	PERKARA	PUTUSAN PN	PK	TIDAK PK
1	Perdata	197	4	193
2	Pidana	2	1	94
3	Pidana Anak	12	0	12

**3. Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Restoratif**

NO	PERKARA	RJ	BERHASIL	TIDAK BERHASIL	DALAM PROSES
1	Perkara Restoratif Justice	73	43	31	0

**4. Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi**

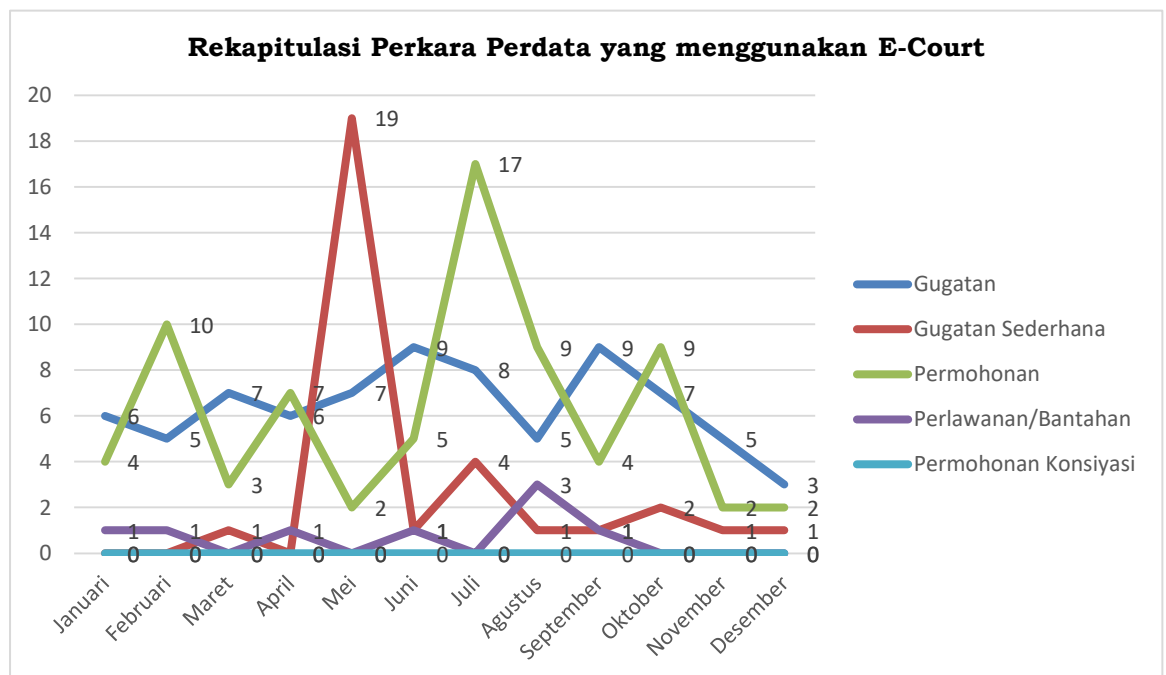
NO	PERKARA	MEDIASI	BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	DALAM PROSES
1	Perkara Gugatan	84	8	0	0

**5. Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi**

NO	PERKARA	JUMLAH PERKARA	JUMLAH YANG DI DIVERSI	BERHASIL	GAGAL
1	Pidana Khusus Anak	12	4	2	2

## 6. Perkara Perdata yang menggunakan E-Court

No	Bulan	Jenis Perkara Perdata					Jumlah Perbulan
		Gugatan	Gugatan Sederhana	Permohonan	Perlawanan/Bantahan	Permohonan Konsiyasi	
1	Januari	6	0	4	1	0	11
2	Februari	5	0	10	1	0	16
3	Maret	7	1	3	0	0	11
4	April	6	0	7	1	0	14
5	Mei	7	19	2	0	0	28
6	Juni	9	1	5	1	0	16
7	Juli	8	4	17	0	0	29
8	Agustus	5	1	9	3	0	18
9	September	9	1	4	1	0	15
10	Oktober	7	2	9	0	0	18
11	November	5	1	2	0	0	8
12	Desember	3	1	2	0	0	6



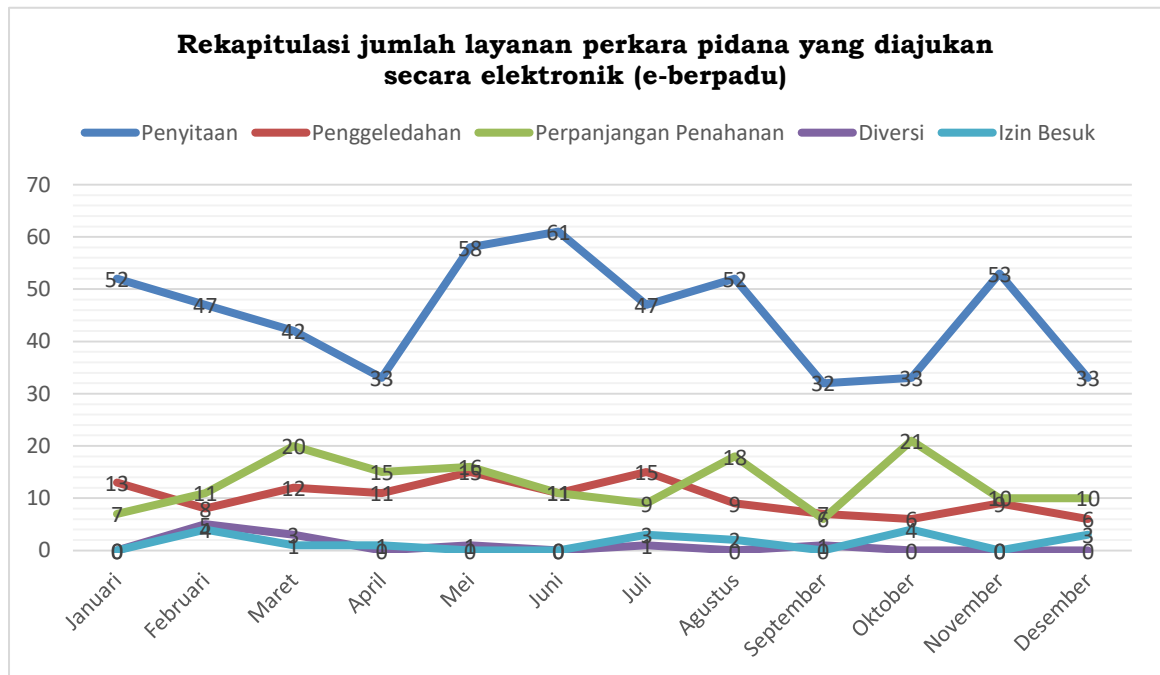
**7. Rekapitulasi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)**

No	Bulan	Jenis Perkara Pidana				Jumlah Perbulan
		Biasa	Singkat	Anak	Praperadilan	
1	Januari	53	0	0	0	53
2	Februari	30	0	2	0	32
3	Maret	33	0	0	0	33
4	April	29	0	0	0	29
5	Mei	27	0	2	1	30
6	Juni	29	0	1	0	30
7	Juli	44	0	3	0	47
8	Agustus	58	0	1	1	60
9	September	32	0	0	0	0
10	Oktober	39	0	1	2	42
11	November	26	0	1	0	27
12	Desember	25	0	1	0	26
Jumlah		425	0	12	4	441

**8. Rekapitulasi jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)**

No	Bulan	Jenis Perkara Pidana					Jumlah Perbulan
		Penyitaan	Pengegeledahan	Perpanjangan Penahanan	Diversi	Izin Besuk	
1	Januari	52	13	7	0	0	72
2	Februari	47	8	11	5	4	75
3	Maret	42	12	20	3	1	78
4	April	33	11	15	0	1	60
5	Mei	58	15	16	1	0	90
6	Juni	61	11	11	0	0	83
7	Juli	47	15	9	1	3	75
8	Agustus	52	9	18	0	2	81
9	September	32	7	6	1	0	46
10	Oktober	33	6	21	0	4	64

11	November	53	9	10	0	0	72
12	Desember	33	6	10	0	3	52
Jumlah		543	122	154	11	18	848



## C. Capaian Prioritas Nasional

### 1. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan kepada Pemohonan Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan, memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Advokat Piket adalah Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturan yang diatur dalam kerjasama kelembangaan Pengadilan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB Tahun 2025 memperoleh anggaran untuk Posbakum sebesar Rp. 44.000.000 pada DIPA 03. Realisasi Anggaran untuk Posbakum adalah 100% Desember 2025.

Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dengan Pos Bantuan Hukum Jems. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberi pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai bagian dari penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang bertanggungjawab, berkualitas dan terkoordinasi demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.

Jadwal Pelayanan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun setiap Senin-Kamis pukul 08.00-12.00 WIB dan 13.00-16.00 WIB serta Jumat pukul 08.00-11.00 WIB dan 13.00-16.00 WIB dengan menempatkan Petugas Pemberi Layanan Hukum di Posbakum atas nama Abdul syukur, S.H. untuk memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Berikut ini jumlah permohonan pelayanan di Posbakum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB Tahun 2025 berjumlah 365 Layanan dengan rincian sebagai berikut:

NO	BULAN	JUMLAH LAYANAN	PEMOHON LAYANAN	KETERANGAN
1	Januari	37	37	
2	Februari	37	37	
3	Maret	37	37	
4	April	37	37	
5	Mei	37	37	
6	Juni	37	37	
7	Juli	37	37	
8	Agustus	37	37	
9	September	36	36	
10	Oktober	10	10	
11	November	12	12	
12	Desember	11	11	
<b>Total</b>		365	365	

## 2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran mewajibkan setiap pengadilan untuk melakukan pelayanan terpadu sidang keliling. Pelayanan Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan sidang keliling memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri antara lain seperti permohonan pergantian nama, permohonan perbaikan akta kelahiran, dan lain-lain sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri.

Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan, baik dilaksanakan secara berkala maupun insidental dengan tujuan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang

mampu atau yang sulit menjangkau gedung pengadilan negeri akibat keterbatasan biaya, fisik, maupun secara geografis. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun meliputi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sendiri terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga untuk Kabupaten Sukamara tetpaut jarak yang cukup jauh. Demi memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, salah satu sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah **“Terciptanya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”**. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melakukan sidang keliling ke Kabupaten Sukamara.

Adapun sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sidang keliling ini, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai tempat sidang (*zetting plaats*) yaitu di Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara dengan luas 8288 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Nomor : 300/1987. Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB telah melakukan beberapa kali sidang keliling ke Kabupaten Sukamara, berikut rinciannya :

No	Tanggal Sidang	Lokasi Sidang	Jumlah Perkara	Jumlah Anggaran yang digunakan	Ket
1	07 Februari 2025	Sukamara	5	8.490.000	
2	25 Juli 2025	Sukamara	4	11.580.000	
3	09 Mei 2025	Sukamara	11	15.240.000	
4	25 Juli 2025	Sukamara	8	14.220.000	
<b>Jumlah</b>			28	49.530.000	

### 3. Perkara Prodeo

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan salah satunya meliputi layanan pembebasan biaya perkara (prodeo). Pembebasan biaya ini diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu. Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah Negara menanggung biaya proses berpekerja di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berpekerja secara cuma-cuma dan dengan begitu dapat meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dibebankan pada Negara melalui anggaran Mahkamah Agung R.I. Layanan Pembebasan Biaya Perkara ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan kerja. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2025 tidak memperoleh anggaran untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum sehingga tidak ada pelaksanaan pembebasan biaya perkara secara prodeo.

**BAB III**

**SUMBER DAYA MANUSIA**

**KOMPOSISI SDM BERDASARKAN**  
**KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN**

**A. Mutasi**

**1. Mutasi Keluar**

Pada Tahun 2025, Hakim maupun Pegawai yang mutasi (keluar) dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah ;

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN LAMA</b>	<b>JABATAN BARU</b>	<b>TMT</b>
<b>1</b>	Masrianor, S.H.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik	22 September 2025
<b>2</b>	Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.	Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar	31 Oktober 2025
<b>3</b>	Erick Ignatius Christoffel, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa	07 November 2025
<b>4</b>	Firmansyah, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Hakim Pengadilan Negeri Watampone	07 November 2025
<b>5</b>	Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Ketua Pengadilan Negeri Slawi	07 November 2025

**2. Mutasi Masuk**

Pada Tahun 2025, Hakim maupun Pegawai yang mutasi (masuk) dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah ;

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN LAMA</b>	<b>JABATAN BARU</b>	<b>TMT</b>
<b>1</b>	Robert Wilya Vendi Prasty, S.T.	-	Klerek-Teknisi Sarana dan Prasaranan (CPNS)	10 Juni 2025
<b>2</b>	Vincencius Fascha Adhy	Hakim Pengadilan Negeri Donggala	Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan	31 Juli 2025

	Kusuma, S.H., M.H.		Bun	
<b>3</b>	Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh	Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	01 Agustus 2025
<b>4</b>	Edi Rahmat, S.H., M.Kn	Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh	Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	01 Agustus 2025
<b>5</b>	Mufti Muhammad, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Melonguane	Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	01 Agustus 2025
<b>6</b>	Febdhy Setyana, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Tamiyang Layang	Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	07 Agustus 2025
<b>7</b>	Pungky Wibowo, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Enrekang	Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	08 Agustus 2025
<b>8</b>	Imam Setyawan, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Belopa	Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	11 Agustus 2025
<b>9</b>	Muhammad Cakranegara, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Waipangu	Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	11 Agustus 2025
<b>10</b>	Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	11 Agustus 2025
<b>11</b>	Hendy Pradipta, S.H.	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tamiyang Layang	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	23 September 2025
<b>12</b>	Ahmad Nur Hidayat, S.H.	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sidoarjo	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	13 Oktober 2025

## B. Promosi

Pada Tahun 2025, Hakim maupun Pegawai yang dipromosikan untuk memangku jabatan baru pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah ;

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN LAMA</b>	<b>JABATAN BARU</b>	<b>TMT</b>
<b>1</b>	Rosilawati, S.E.	Jurusita Pengganti	Jurusita	23 September 2025
<b>2</b>	Ikha Tina, S.H., M.Hum	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	13 Oktober 2025
<b>3</b>	Fera Aditias Ramadhan, S.H.	Analisis Perkara	Jurusita Pengganti	24 Oktober 2025

		Peradilan		
--	--	-----------	--	--

### C. Pensiun

Pada Tahun 2025, Hakim maupun Pegawai pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak ada pensiun.

### D. Diklat

Pada Tahun 2025, Hakim maupun Pegawai pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mendapat pelatihan ataupun pendidikan adalah:

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT	TANGGAL PELAKSANAAN	PELAKSANAAN DIKLAT
1	Tania Aurelia Timbung, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Tahun Anggaran 2025	08 Januari 2025 s/d 27 Maret 2025	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung
2	Yoga Aditama, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Tahun Anggaran 2025	08 Januari 2025 s/d 27 Maret 2025	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung
3	Dimas Eidi Trianto, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Tahun Anggaran 2025	08 Januari 2025 s/d 27 Maret 2025	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Strajak Diklat Kumdil Mahkamah Agung
4	Robert Wilya Vendi Prasty, S.T.	Klerek-Teknisi Sarana dan	Pelatihan Dasar CPNS Golongan		Secara Daring dari Kantor Pengadilan

		Prasaranan (CPNS)	III Tahun Anggaran 2025		Negeri Pangkalan Bun
5	Chanro Simamora, S.H.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Diklat PPK	23 November 2025	Secara Daring dari Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi. Adapun keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebagai berikut:

#### 1. Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

NO	NAMA	NIP/NIPPPK	JABATAN	PANGKAT
1	Ikha Tina, S.H., M.Hum.	197603172001121002	Ketua Pengadilan	Pembina Utama Muda (IV/c)
2	Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.Hum.	197604092002121004	Wakil Ketua Pengadilan	Pembina Tingkat I (IV/b)
3	Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.	199002202017121006	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I (III/b)
4	Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.	199403012017121003	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I (III/b)
5	Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.	199406102017121003	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I (III/b)
6	Mufti Muhammad, S.H.	198909262017121002	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I (III/b)
7	Edi Rahmad, S.H., M.Kn.	199006252017121005	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I (III/b)
8	Muhammad Cakranegara, S.H.	199507172017121002	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I (III/b)
9	Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.	199402102017122002	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I (III/b)
10	Febdhy Setyana, S.H., M.H.	198602232017121001	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I (III/b)
11	Imam Setyawan, S.H.	199506012017121002	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I (III/b)
12	Pungky Wibowo, S.H., M.H.	199310142017121002	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I (III/b)
13	Harly Marilyn Simanjuntak, S.H.	197610012001121002	Panitera	Pembina (IV/a)

14	Husni Thamrin, S.T.	197803082009041003	Sekretaris	Pembina (IV/a)
15	Hendy Pradipta, S.H.	198704302011011014	Panitera Muda Hukum	
16	Hariyanto	197501151994031002	Panitera Muda Pidana	Penata (III/c)
17	Wahyudi, S.H.	197107101993031006	Panitera Muda Perdata	Penata (III/c)
18	Chanro Simamora, S.H.	198904042012121002	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Penata (III/d)
19	Didik Sulaiman, S.H.	198110182012121003	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Penata (III/c)
20	Diyah Eka Prasetya Rini, S.I.P.	199405152019032013	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Penata (III/c)
21	Bayu Sistiawan, A.Md., S.H.	198309232011011004	Panitera Pengganti	Penata Muda Tingkat I (III/b)
22	Maya Agustina, S.H.	198408222014082001	Panitera Pengganti	Penata Muda Tingkat I (III/b)
23	Rosilawati, S.E.	198407192009122002	Jurusita Pengganti	Penata (III/c)
24	Deni Nurmansyah, S.E.	198401012006041005	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Penata Tingkat I (III/d)
25	Fera Aditias Ramadani, S.H.	199502122020122010	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda Tingkat I (III/b)
26	Maria Herlina Angriyani Moi Wato, A.Md, S.H.	199812172022032010	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a)
27	Soraya Isfandari, S.Pd.Sd	198707112009022002	Operator-Penata Layanan Operasional	Penata Muda Tingkat I (III/b)
28	Sulistiyawati	198403062014082001	Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan	Pengatur (II/c)
29	Daniel Simanihuruk, S.Sos	199706302022031010	Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda (III/a)
30	Menak Manullang, A.Md	199211132022042001	Klerek-Pengelola Data dan Informasi	Pengatur (II/c)
31	Tania Aurelia Timbung, S.H.	200012072024052001	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a)
32	Yoga Aditama, S.H.	199801052024051001	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a)
33	Dimas Edi Trianto, S.H.	199906212024051001	Klerek-Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a)
34	Robet Wilya Vendi Prastya, S.T.	199507052025061011	Klerek-Teknisi Sarana dan Prasaranan (CPNS)	Penata Muda (III/a)
35	Noor Maydah Lestika	198905292025212038	Operator-Penata Layanan	IX

			Operasional (PPPK)	
<b>36</b>	Erwin Tirajul Akbar	199107252025211037	Operator-Penata Layanan Operasional (PPPK)	IX
<b>37</b>	Ega Ayu Ananda	199409152025212049	Operator-Penata Layanan Operasional (PPPK)	IX
<b>38</b>	Suci Paramita	199809082025212012	Operator-Penata Layanan Operasional (PPPK) (PPPK)	IX
<b>39</b>	Nurul Hidayah	199805102025212036	Operator-Penata Layanan Operasional (PPPK)	IX
<b>40</b>	Hiskia J. Aritonang	198402112025211031	Operator Layanan Operasional (PPPK)	V
<b>41</b>	Kao M. Kaokabanullah	198804182025211044	Operator Layanan Operasional (PPPK)	V
<b>42</b>	Masrun	199511082025211022	Operator Layanan Operasional (PPPK)	V
<b>43</b>	Mohamad Aji Purnomo	199810202025211020	Operator Layanan Operasional (PPPK)	V
<b>44</b>	Harco Yossie	198211062025211032	Operator Layanan Operasional (PPPK)	V
<b>45</b>	Rexzy Adhipura	199306062025211048	Operator Layanan Operasional (PPPK)	V
<b>46</b>	Samsi	198309132025211037	Pengelola Umum Operasional (PPPK)	I

**2. Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Berdasarkan Pendidikan :**

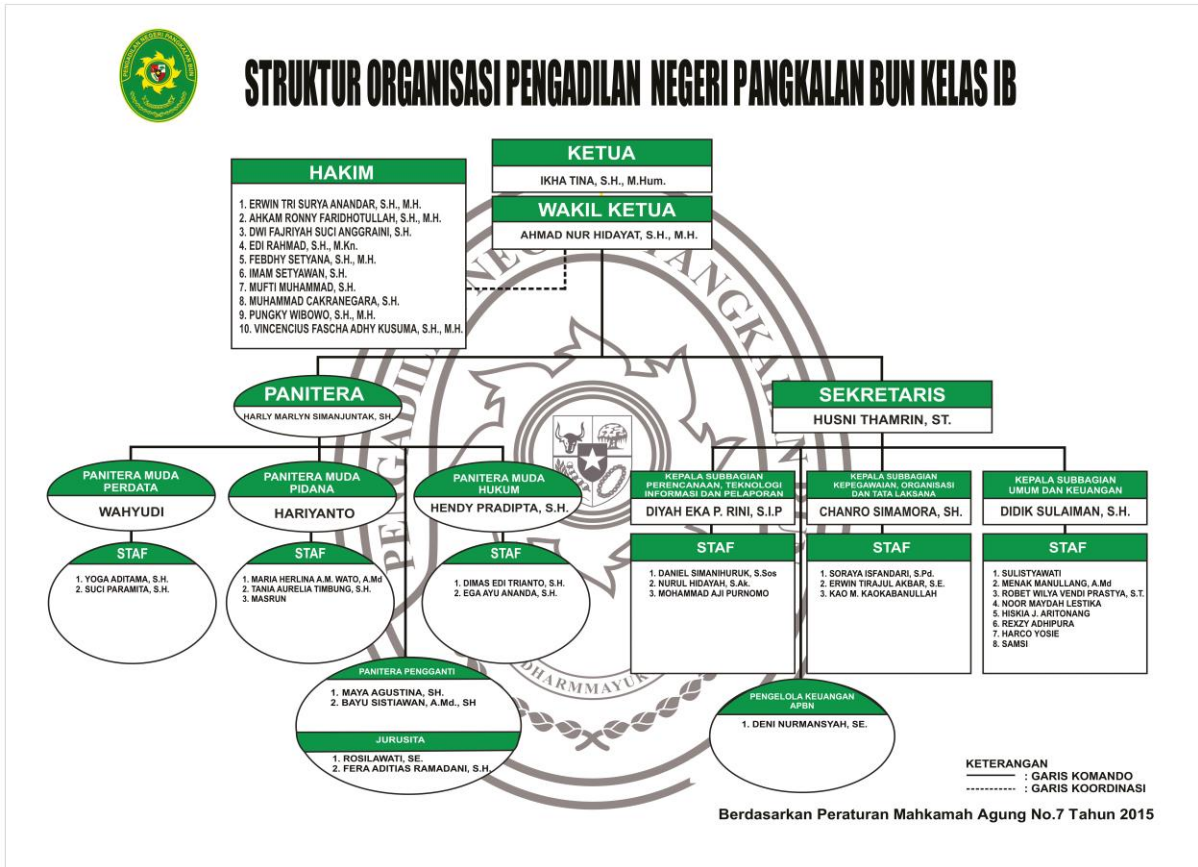
No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Doktoral (S-3)	-	-	-
2	Magister (S-2)	7	1	8
3	Sarjana (S-1)	15	12	27
4	Diploma (D-3)	-	1	1
5	SLTA/Sederajat	8	1	9
6	SLTP/Sederajat	-	-	-
7	SD/Sederajat	1	-	1
8	Non Pendidikan	-	-	-

**3. Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Berdasarkan Golongan :**

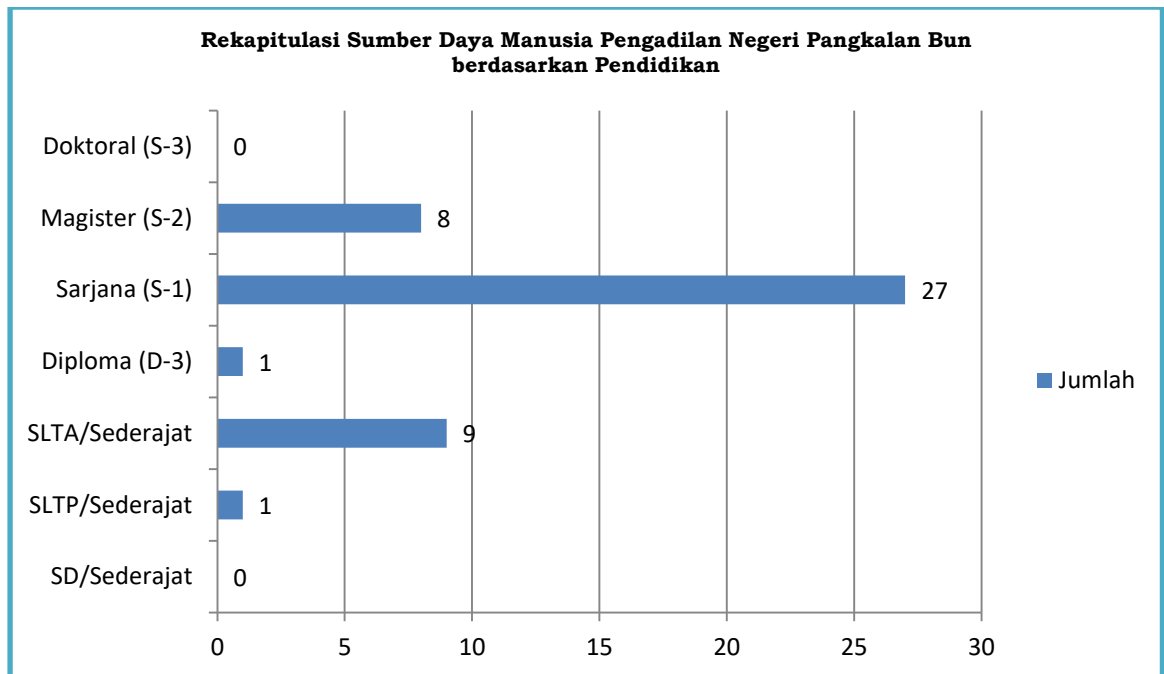
No	Pangkat	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	1	1
4	Pembina Tk. I	IV/b	1	-	1
5	Pembina	IV/a	2	-	2
6	Penata Tk. I	III/d	3	-	3
7	Penata	III/c	6	1	7
8	Penata Muda Tk. I	III/b	8	4	12
9	Penata Muda	III/a	4	2	6
10	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-
11	Pengatur	II/c	0	2	2
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
14	Golongan IX	III/a	1	4	5

15	Golongan V	II/a	6	0	6
16	Golongan I		1	0	1

**2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun**



### 3. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Pendidikan



### 4. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Jabatan

<b>PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN</b>	
<b>HAKIM</b>	<b>Jumlah</b>
Ketua	1
Wakil	1
Hakim	10
<b>KEPANITERAAN</b>	
<b>Jumlah</b>	
Panitera	1
Panitera Muda	3
Panitera Pengganti	2
Jurusita	1
Jurusita Pengganti	1
Pelaksana	4
PPPK	3

<b>KESEKRETARIATAN</b>	<b>Jumlah</b>
Sekretaris	1
Kepala Subbagian	3
Fungsional	1
Pelaksana	5
PPPK	9
<b>Total</b>	<b>39</b>

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### A. Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun 2025, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh anggaran sebesar Rp. 7.718.647.000,- terdiri dari DIPA 01 sebesar Rp. 7.359.190.805,- dan DIPA 03 sebesar Rp. 196.650.000,-.

Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025 DIPA 01 :

No	Rincian	2024	2025
1	Anggaran	5.328.182.000,-	7.521.997.000,-
2	Realisasi	5.326.988.679,-	7.359.190.805,-
3	Persentase Realisasi	99.98%	97.84%

Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2023 DIPA 05 :

No	Rincian	2024	2025
1	Anggaran	205.000.000,-	196.650.000,-
2	Realisasi	204.938.000,-	196.229.800,-
3	Persentase Realisasi	99.97%	99.79

#### B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

##### 1. Gedung

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB yang dipakai sekarang ini adalah gedung bertingkat II pada bagian muka dan terletak di Jalan Sutan Syahrir No.16, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.



Gedung Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memiliki luas gedung 4416 m<sup>2</sup>. Disamping halaman kantor terdapat sebuah Musholla “AL-FATH” yang dibangun pada tahun 2014, dan bagian belakang kantor terdapat Lapangan Tenis yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Dibelakang dan disamping kanan kantor dibangun tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat khusus Hakim dan Pegawai, sedangkan pada bagian samping kanan untuk Kendaraan Tahanan, Polisi dan Pengunjung.

Terdapat Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pojok E-Court untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat juga Ruang Mediasi, Perpustakaan, Ruang Tunggu Pengunjung, Ruang Menyusui atau Laktasi, Tempat Merokok (Smoking Area), serta toilet yang bersih untuk pengunjung dan pegawai, dan toilet khusus difabel. Serta ruang tunggu pengunjung di samping ruang sidang utama. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun juga menyediakan ruang tamu terbuka di samping Ruang PTSP sebagai bukti keterbukaan dalam menerima tamu.

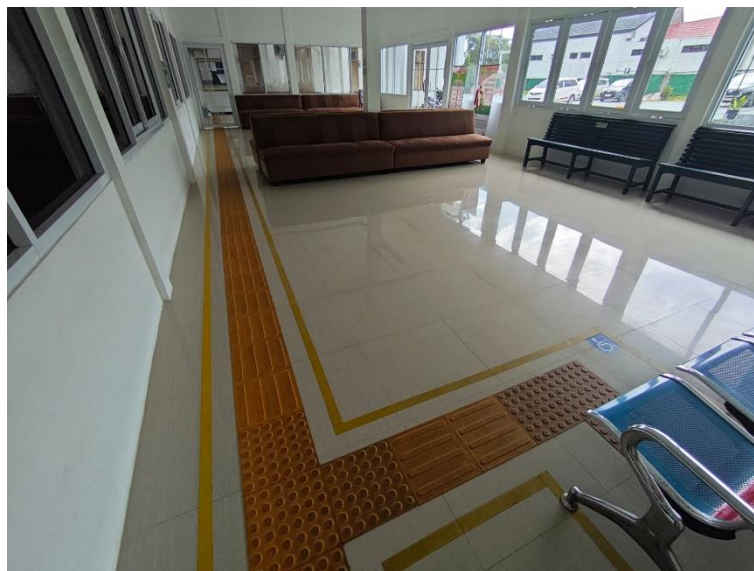
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menerapkan sistem satu pintu secara terpadu sehingga seluruh pengunjung, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dapat ke gedung dengan melewati satu pintu depan saja agar dapat dengan mudah dipantau. Terlebih lagi setiap tamu yang masuk diwajibkan melapor ke Meja PTSP dan akan diberi tanda pengenal berupa kartu pengunjung.

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berupa melakukan beberapa terobosan dan renovasi guna melengkapi sarana dan prasarana, antara lain:

- Pengecatan Ruang Tunggu Sidang



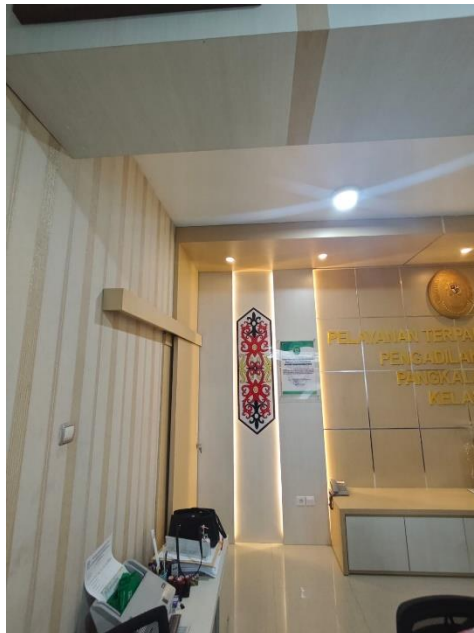
- Pemasangan Granit Ruang Tunggu Pengunjung



- Pengecatan atap Gedung Lantai 2



- Pemasangan Background bagian kiri, kanan, dan atas Ruangan PTSP





- Perbaiki Slup Toilet Pengunjung



- Pengecatan Mushola Kantor



- Pemasangan Dinding Kamar Mandi/toilet ruang tunggu pengunjung sidang



- Perbaiki Instalasi ruang tunggu pengunjung sidang, ruang ketua, sekretaris, Lorong perdata



- Perbaiki Lantai Kamar Mandi Disabilitas



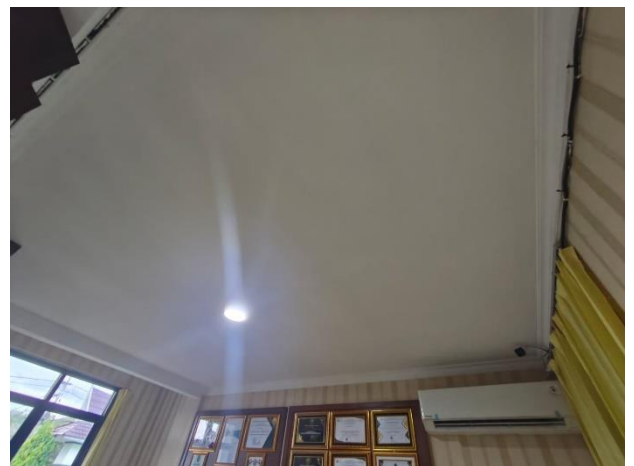
- Perbaiki lantai selasar Depan Ruang Tahanan, Ruang Penasehat Hukum, dan Teras Pengunjung sidang



- Perbaiki Lantai Ruang Arsip



- Pengecatan Dinding Tahanan wanita, plavon Ruang PTSP, Ruang Tamu terbuka, Posbakum dan Working Space.



- Perbaikan instalatir listrik dan penggantian lampu di Ruang Arsip, kesekretariatan,wakil,ketua,Hakim,PTSP, Lorong, PP dan Running Text.

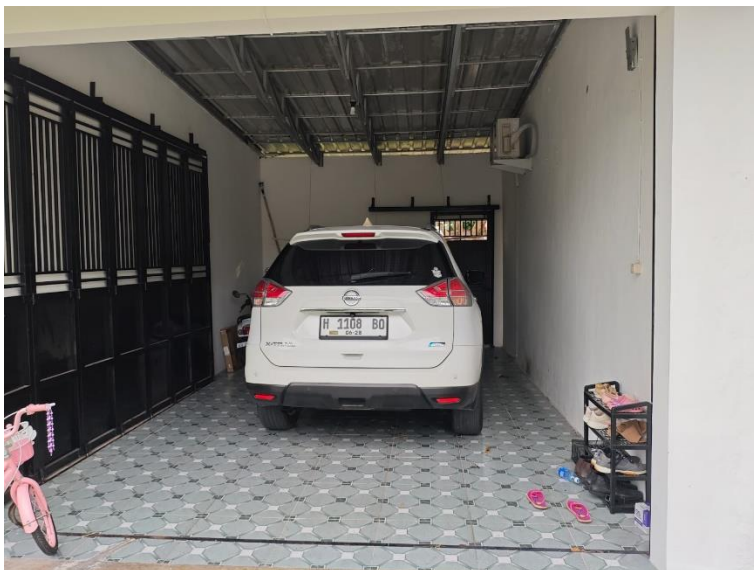




- Perbaiki Partisi Di Ruang Mediasi Center



- Tiang Garasi Rumah Dinas Hakim di Jalan Ahmad Wongso



- Pengecetan Rumah Dinas Hakim Dijalan Ahmad Wongso



- Perbaikan Lantai Teras Rumah Dinas Hakim Dijalan Achmad Wongso



- Pengecetan Rumah Dinas Hakim di Gg. Lombok



## 2. Gedung Tempat Sidang Keliling (*Zetting Platz*)

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai tempat sidang di Luar Gedung Pengadilan (*Zetting Platz*) yaitu di Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara dengan luas 8288 m<sup>2</sup> dengan sertifikat nomor : 300/1987 namun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 22/SEK/SK/I/2023 dialihkan kepada Pengadilan Agama Sukamara untuk kepentingan pembangunan Gedung Pengadilan Agama Sukamara tahun 2023. Untuk itu aset BMN *Zetting Platz* di Sukamara telah ditransfer keluar melalui Aplikasi SIMAK BMN. *Zetting Platz* lainnya terletak di Pangkat, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan status rusak parah. Pada Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah beberapa kali melakukan sidang keliling di Kabupaten Sukamara, berikut rinciannya:

No	Tanggal Sidang	Lokasi Sidang	Jumlah Perkara	Jumlah Anggaran yang digunakan	Ket
1	07 Februari 2025	Sukamara	5	8.490.000	
2	25 Juli 2025	Sukamara	4	11.580.000	
3	09 Mei 2025	Sukamara	11	15.240.000	
4	25 Juli 2025	Sukamara	8	14.220.000	
<b>Jumlah</b>			28	49.530.000	

## 3. Rumah Dinas

Bahwa untuk kenyamanan Pejabat baik Teknis maupun structural yang melaksanakan tugasnya di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pemerintah telah menyediakan Rumah Dinas untuk tempat tinggal sebanyak 10 unit dengan dibebani kewajiban untuk setiap bulannya membayar sewa kepada Negara, adapun kondisi Rumah Dinas tersebut per tanggal 31 Desember 2025 :

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-	
3	Rumah Dinas Hakim	6	6	-	-	
4	Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-	
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	1	-	-	

<b>Jumlah</b>	10	10	-	-	
---------------	----	----	---	---	--

Rumah Dinas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut per tanggal 31 Desember 2024 sudah di tempat Pejabat Teknis maupun Struktural dengan rincian sebagai berikut:

- Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan yang terletak di Jalan Jendral Soedirman di tempati oleh Sdr. Ahmad Nur Hidayat, S.H, M.H., dengan nomor SK: 225/SEK.W16-U3/SK.RT1/X/2025.
- Rumah Dinas Hakim yang terletak di Jalan Sutan Syahrir di tempati oleh Sdri. Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum., dengan nomor SK: 230/SEK.W16-U3/SK.RT1/X/2025.
- Rumah Dinas Hakim yang terletak di Jalan Sutan Syahrir di tempati oleh sdr. Edi Rahmad S.H., M.Kn., dengan nomor SK: 228/SEK.W16-U3/SK.RT1/X/2025.
- Rumah Dinas Hakim yang terletak di Jalan Sutan Syahrir gg.lombok di tempati oleh sdr. Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., dengan nomor SK: 200/SEK.W16-U3/SK.RT1/VIII/2025.
- Rumah Dinas Hakim yang terletak di Jalan Ahmad Wongso di tempati oleh sdr. Febdhy Setyana S.H., M.H.dengan nomor SK: 226/SEK.W16-U3/SK.RT1/X/2025.
- Rumah Dinas Hakim yang terletak di Jalan Ahmad Wongso di tempati oleh sdr. Mufti Muhammad S.H., dengan nomor SK: 227/SEK.W16-U3/SK.RT1/X/2025.
- Rumah Dinas Hakim yang terletak di Jalan Ahmad Wongso di tempati oleh sdr. Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H. dengan nomor SK: 018/SEK.W16-U3/SK.RT1/I/2025.
- Rumah Dinas Panitera yang terletak di Jalan Sudirman, SH di tempati oleh sdr. Harly Marlyn Simanjuntak, S.H., dengan nomor SK: 019/SEK.W16-U3/SK.RT1/I/2025.
- Rumah Dinas Sekretaris yang terletak di Jalan Sudirman, SH di tempati oleh sdr. Wahyudi., dengan nomor SK: 021/SEK.W16-U3/SK.RT1/I/2025.

#### 4. Kendaraan Dinas

Bahwa untuk kenyamanan Pejabat Teknis maupun Struktural yang melaksanakannya tugas di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam hal ini Pemerintah telah menyediakan Kendaraan Dinas untuk transportasi dan membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas, adapun Kendaraan Dinas tersebut per tanggal 31 Desember 2025 :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
<b>I</b>	<b>JENIS KENDARAAN RODA 4</b>					
1	Pajero Sport Dakkar	2022	✓	-	-	Mobil Dinas Ketua
2	Toyota Kijang Innova Model Minibus	2010	✓	-	-	Mobil Dinas Wakil Ketua
3	Toyota Kijang Super Long Model Minibus	2003	✓	-	-	Mobil Dinas Panitera
4	Toyota Kijang Innova Model Minibus	2007	✓	-	-	Mobil Dinas Sekretaris
5	Toyota Kijang Super Short	1991	✓	-	-	Mobil Dinas Operasional
<b>II</b>	<b>JENIS KENDARAAN RODA 2</b>					
1	Honda Kharisma	2005	✓	-	-	
2	Honda Kharisma	2005	✓	-	-	
3	Honda Mega Pro	2006	✓	-	-	
4	Honda Supra X	2003	✓	-	-	
5	Honda Win	1994	✓	-	-	

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun setiap kendaraan dinas memiliki penanggungjawab masing-masing, adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Uraian	Penanggung Jawab	Nomor SK	Keterangan
<b>I</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>			

<b>1</b>	Pajero Sport Dakkar	Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.	188/SEK.W16- U3/SK.RT1/VIII/2024	Pinjam Pakai Pemda Kotawaringin Barat
<b>2</b>	Toyota Kijang Innova Model Minibus	Ikha Tina, S.H., M.Hum.	118/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2024	
<b>3</b>	Toyota Kijang Super Long Model Minibus	Didik Sulaiman, S.H.	029/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2025	
<b>4</b>	Toyota Kijang Innova Model Minibus	Husni Thamrin, S.T.	024/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2025	Pinjam Pakai Pemda Sukamara
<b>5</b>	Toyota Kijang Super Short	Harly Marlyn Simanjuntak, S.H.	025/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2025	
<b>II</b>	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>			
<b>1</b>	Honda Kharisma	Deni Nurmansyah, S.E.	030/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2025	
<b>2</b>	Honda Kharisma	Hariyanto	212/SEK.W16- U3/SK.RT1/X/202 5	
<b>3</b>	Honda Mega Pro	Didik Sulaiman, S.H	029/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2025	
<b>4</b>	Honda Supra X	Wahyudi	027/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2025	
<b>5</b>	Honda Win	Didik Sulaiman, S.H.	029/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2025	

## 5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mendukung jalannya peradilan baik secara teknis maupun secara administratif sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan. Berikut ini Sarana dan Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun :

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
<b>I</b>	<b>Sarana dan Prasarana Gedung</b>		
<b>1</b>	Ruang Ketua	1	

<b>2</b>	Ruang Wakil Ketua	1	
<b>3</b>	Ruang Hakim	1	
<b>4</b>	Ruang Panitera	1	
<b>5</b>	Ruang Sekretaris	1	
<b>6</b>	Ruang Sidang Umum	3	
<b>7</b>	Ruang Sidang Anak	1	
<b>8</b>	Ruang Kepaniteraan	3	
<b>9</b>	Ruang Kesekretariatan	1	
<b>10</b>	Ruang Panitera Pengganti	1	
<b>11</b>	PTSP	1	
<b>12</b>	Meja e-Court	1	Bergabung dengan Inzage pada meja PTSP Kepaniteraan Perdata
<b>13</b>	Ruang Mediasi/Diversi	1	
<b>14</b>	Ruang Jaksa	1	
<b>15</b>	Ruang Posbakum	1	
<b>16</b>	Ruang Penasihat Hukum	1	Digabung dengan Ruangan BAPAS
<b>17</b>	Ruang Tunggu Sidang Anak	1	
<b>18</b>	Perpustakaan	1	
<b>19</b>	Ruang Serba Guna	-	
<b>20</b>	Ruang IT	1	
<b>21</b>	Ruang Arsip	2	
<b>22</b>	Ruang Persediaan	1	
<b>23</b>	Ruang Barang Bukti	1	
<b>24</b>	Gudang	1	
<b>25</b>	Ruang Ibu Menyusui/Laktasi	1	Digabung dengan Ruang Kesehatan dan Ruang Tunggu Ramah Anak
<b>26</b>	Ruang Tahanan Pria	1	
<b>27</b>	Ruang Tahanan Wanita	1	
<b>28</b>	Mushola	1	
<b>29</b>	Ruang Tamu Terbuka	1	

<b>30</b>	Tempat Merokok/ <i>Smoking Area</i>	1	
<b>31</b>	Toilet	11	
<b>32</b>	Toilet Difabel	2	
<b>33</b>	Ruang Tunggu Pengunjung	1	
<b>34</b>	Ruang Prioritas (Disabilitas)	1	
<b>35</b>	Ruang CO-Workong Space	1	
<b>36</b>	Pos Satpam/Keamanan	-	Masih belum tersedia
<b>II</b>	<b>Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran</b>		
<b>1</b>	Minibus	3	
<b>2</b>	Sepeda Motor	6	
<b>3</b>	Speedboat	1	
<b>4</b>	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	2	
<b>5</b>	Lemari Besi/Metal	9	
<b>6</b>	Lemari Kayu	11	
<b>7</b>	Rak Besi	30	
<b>8</b>	Filling Cabinet Besi	7	
<b>9</b>	Brankas	2	
<b>10</b>	Tabung Pemadam Api	4	
<b>11</b>	CCTV	3	
<b>12</b>	Mesin Absensi	2	
<b>13</b>	Papan Pengumuman	2	
<b>14</b>	Meja Kerja Kayu	43	
<b>15</b>	Kursi Besi/Metal	97	
<b>16</b>	Kursi Kayu	32	
<b>17</b>	Sice	2	
<b>18</b>	Bangku Panjang Kayu	30	
<b>19</b>	Meja Rapat	1	
<b>20</b>	Meja Komputer	8	
<b>21</b>	Tempat Tidur Besi	1	
<b>22</b>	Meja Resepsionis	2	
<b>23</b>	Mesin Pemotongan Rumput	1	
<b>24</b>	AC Split	27	

<b>25</b>	Kipas Angin	9	
<b>26</b>	Televisi	9	
<b>27</b>	Amplifier	3	
<b>28</b>	Wireless	1	
<b>29</b>	Dispenser	4	
<b>30</b>	Lambang Instansi	1	
<b>31</b>	<i>Handy Cam</i>	1	
<b>32</b>	Karpet	6	
<b>33</b>	Gordy/Kray	356	
<b>34</b>	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	
<b>35</b>	UPS	7	
<b>36</b>	Digital LED Running Text	1	
<b>37</b>	Kamera Digital	1	
<b>38</b>	Facsimile	1	
<b>39</b>	Genset	2	
<b>40</b>	Komputer Jaringan Lainnya	3	
<b>41</b>	PC Unit	34	
<b>42</b>	Laptop	17	
<b>43</b>	Printer	27	
<b>44</b>	Scanner	8	
<b>45</b>	Server	3	
<b>46</b>	Router	1	
<b>47</b>	Rak Server	3	
<b>48</b>	Switch	1	
<b>49</b>	Audio Mixer	1	
<b>50</b>	Video Conference Camera	1	
<b>51</b>	Speaker	9	
<b>52</b>	Mic	12	

### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Upaya meningkatkan pelayanan publik menuju layanan prima, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah mencoba mencanangkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan professional dalam memberikan pelayanan yang maksimal, bermartabat, transparan dan akuntabel, hal ini sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menempatkan pembenahan teknologi informasi sebagai salah satu prioritas perubahan yang diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas, dan transportasi yang lebih modern dan terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator, maupun user dalam implementasi dari masing-masing aplikasi. Berikut ini gambaran singkat dukungan teknologi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun:

No	Nama Pengadilan	Alamat Website	Alamat SIPP Web	Versi SIPP Lokal yang terpasang	Nama Provider Internet 7 Bandwith	Model Type Server	Fungsi Sever	Kondisi Server
1	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB	<a href="https://pn-pangkalanbungo.id/baru">https://pn-pangkalanbungo.id/baru</a>	<a href="https://sipp.pn-pangkalanbungo.id/">https://sipp.pn-pangkalanbungo.id/</a>	6.0.1		Fujitsu RX 1330M1	SIPP, MIS, dan PTSP	Baik
						Rainer Server SV110C4	Maintenance, Sinkronisasi, dan BackUpData	Baik
						Fujitsu TX 1330M4	Back Up Data SIPP dan MIS serta Aplikasi Lainnya	Baik

Berikut sarana dan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki Pengadilan Negeri Pangkalan Bun :

#### 1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Untuk pengelolaan Teknologi, Informasi, perangkat keras yang tersedia pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun :

- a. Server : 3 unit
- b. Personal Computer : 34 unit
- c. Komputer Jaringan Lainnya : 3 unit
- d. Laptop : 17 unit
- e. Mikrotik : 1 unit
- f. Switch 24 Port : 1 unit
- g. Scanner : 8 unit
- h. Printer : 27 unit
- i. Televisi : 9 unit
- j. Faximile : 1 unit
- k. Kiosk : 1 unit
- l. 1 (satu) alat perekam visual berupa :
  - 1 HardDisk External
  - 16 Kamera CCTV
  - 1 Kamera DSLR (Kondisi Rusak)
  - 1 Handicam

## 2. Perangkat Lunak (Software)

Untuk pengelolaan Teknologi Informasi, perangkat lunak yang tersedia pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yaitu :

- a. SIPP sudah menggunakan versi 5.6.4.
- b. Website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sudah disesuaikan dengan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.
- c. Informasi mengenai Tilang (Pidana Lalu Lintas), dapat diakses melalui url [tilang.pn-pangkalanbun.go.id](http://tilang.pn-pangkalanbun.go.id)
- d. Aplikasi Jadwal Sidang yang terkoneksi dengan SIPP lokal.
- e. Aplikasi Perpustakaan Lokal dan online ([pustaka.pn-pangkalanbun.go.id](http://pustaka.pn-pangkalanbun.go.id))
- f. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)
- g. Aplikasi Papan Informasi
- h. Antrian PTSP
- i. Aplikasi Panggilan Sidang
- j. Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- k. E-Court

- l. E-Berpadu (elektornik berkas pidana terpadu) adalah integrasi berkas pidana antar penegak huku. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
- m. SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan)
- n. One Gate System Request, data permintaan barang ATK atau jasa perbaikan yang dapat diakses secara online.
- o. File Sharing di Server
- p. Audio Anti Gratifikasi
- q. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara online
- r. Assistant Virtual Informasi dan Layanan (AVILA)
- s. PTSP Online
- t. Email resmi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ([pangkalanbunpn@gmail.com](mailto:pangkalanbunpn@gmail.com)), email bantuan delegasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ([bantuandelegasipnbu@gmail.com](mailto:bantuandelegasipnbu@gmail.com)), dan email Pengaduan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ([pengaduanpnpbun@gmail.com](mailto:pengaduanpnpbun@gmail.com))

Pada Subbagian Umum dan Keuangan menggunakan aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan instansni lain, diantaranya adalah Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi SIMAN, Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMANTAP, Aplikasi Komdanas, Aplikasi SILABI, Aplikasi SIMARI, Aplikasi SIMPONI, Aplikasi MONEV BAPENAS, Aplikasi Monev Anggaran, Aplikasi SIRUP, san e-SADEWA.

Pada Subbagain Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksanakan menggunakan aplikasi seperti Aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian), aplikasi e-kinerja, aplikasi komdanas, dan aplikasi SIMARI.

### **3. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)**

Pengelolaan Teknologi Informasi terkait dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sudah menggunakan versi 6.0.1.

**Sistem Informasi Penelusuran Perkara**  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Search/Carang  
Ando Login Terbaru

Home Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Umum Pidana Khusus SIPP Delegasi Laporan Jadwal Sidang Arsip Perkara Antrian e-Court e-Payment Referensi Smart Majelis System

Release Note  
Versi : 4.0.1

No	Versi	Deskripsi
1	4.0.1	Bekas Lingkungan Peradilan : Penambahan Fitur Smart Majelis
2	4.0.1	Bekas Lingkungan Peradilan : Laporan Statistik Smart Majelis
3	4.0.1	Bekas Lingkungan Peradilan : Format Jam pada Tunda dan Esti Jadwal Sidang (h -> H)

Load Time : 0.0160 Sec. | Memory Available : 126M | Memory Usage : 4.58 MB

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

User Online : 1 Visitor

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, bahwa “Pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi, dan ketepatan waktu pengisian data SIPP. Maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melaksanakannya dengan mengaplikasikan aplikasi Monitoring dan Implementasi SIPP (MIS) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang digunakan untuk memonitoring dan mengawasi kepatuhan pengisian data SIPP. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 versi MIS yang digunakan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah MIS versi 2.5.

**MONITORING IMPLEMENTASI SIPP**  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TAHUN 2025

**MONITORING** 18 DES 2025  
Versi : 2.5

Data Umum Perdata Pidana Penetapan Jadwal Sidang Putus & Minutasi E-Doc Arsip Perkara

Delegasi Kinerja Bacilum

INFO	DATA
Penahanan	- Perkara
Penundaan Jadwal Sidang	- Perkara
Pengisian Data Saksi	- Perkara
Pengisian Putusan Akhir	- Perkara
Putusan Belum Minutasi	- Perkara

DAFTAR MINUTASI TERBAIK BULAN INI

Hakim Panitera Pengganti

1. **AHKAM RONNY FARIDHOTULLAH, S.H., M.H.** Skor : 210  
Minutasi bulan ini : 11 perkara.  
Minutasi tercepat bulan ini : 9

Load Time : 0.4987 sec. Hak Cipta © Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 2018 Versi SIPP 6.0.1

Dengan adanya MIS pengisian data SIPP bisa dimonitoring sehingga pengisian bisa lebih valid, akurasi, dan tepat waktu.

#### **4. E-Court**

E-Court adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan secara online. Aplikasi E-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. E-Court merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik.

## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

#### A. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Ruang lingkup yang diukur dalam survei ini terdiri dari 9 (Sembilan) komponen, sebagai berikut :

- a. Persyaratan
- b. Prosedur
- c. Waktu Pelayanan
- d. Biaya/ Tarif
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Sarana dan Prasarana
- i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dengan hasil survey, maka ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh skor rata-rata **3,98/ 99,69%**. Berdasarkan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB didapatkan tingkat kepuasan responden paling rendah berada pada ruang lingkup :

- a. Perilaku Pelaksana
  - b. Prosedur
  - c. Persyaratan.
-

## **B. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)**

Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melaksanakan system satu pintu atau dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berdasarkan Surat Keputusan Direkter Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019. Dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini masyarakat pengguna pengadilan, cukup dilayani melalu satu pintu aja,sehinggs ASN di lingkungan peradilan terhindar dari komunikasi dengan para pihak yang berpekara. Hal ini merupakan salah bentuk dari Pembangunan Zona Intergritas.

Pelayan yang tersedia pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain :

### **a. Kesekretariatan**

Dibidang Kesekretariatan ini telah dilaksanakan tata persuratan secara elektronik yang artinya semua surat maupun surat keluar telah didokumentasikan secara elektronik, sehingga memudahkan dan mempercepat dalam tata persuratan. Pelayanan bagian Kesekretariatan lainnya adalah register buku tamu. Dengan adanya register buku tamu ini maka semua tamu baik yang akan dilayani oleh Meja PTSP maupun tamu yang menghadao Hakim atau ASN Pengadilan akan tercatat dengan detail sehingga pengawasanya pun akan lebih mudah dan pimpinan bisa memantau secara langsung.

### **b. Kepaniteraan**

Semua jenis pelayanan kepaniteraan telah dilayani secara elektronik.

#### **1. Kepaniteraan Hukum**

Pelayanan yang terdapat pada Kepaniteraan Hukum antara lain :

- Permohonan Surat Keterangan belum pernah dipidana bagi masyarakat yang memerlukan. Permohonan Surat Keterangan tersebut telah menggunakan aplikasi eraterang ([eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id](http://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id)) yang telah terkoneksi langsung dengan aplikasi PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Aplikasi eraterang diimplementasikan mulai bulan Agustus 2019. Permohonan surat keterangan melalui aplikasi eraterang pada bulan Januari sampai dengan bulan

Desember 2024 139 (Seratus Tiga Puluh Sembilan) permohonan.

- Pihak yang akan mengajukan pengaduan dapat langsung diterima oleh petugas PTSP, untuk diteruskan kepada yang berwenang. Pada Tahun 2024 tidak ada laporan pengaduan yang diterima di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

## 2. Kepaniteraan Pidana

Pelayanan yang ada pada Kepaniteraan Pidana antara lain;

- E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) meliputi layanan elektronik persetujuan/ijin penggeledahan dan penyitaan, permohonan perpanjangan penahanan dari penyidik/penuntut umum.
- Permohonan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- Pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kepaniteraan Pidana.

## 3. Kepaniteraan Perdata

Pelayanan yang ada pada Kepaniteraan Perdata antara lain :

- Pendaftaran perkara melalui *e-Court*, sampai dengan tahapan pembayaran biaya yang dikeluarkan untuk membayar panjar perkara melalui e-SKUM.
- Menerima permohonan untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

## C. Inovasi Pelayanan Publik

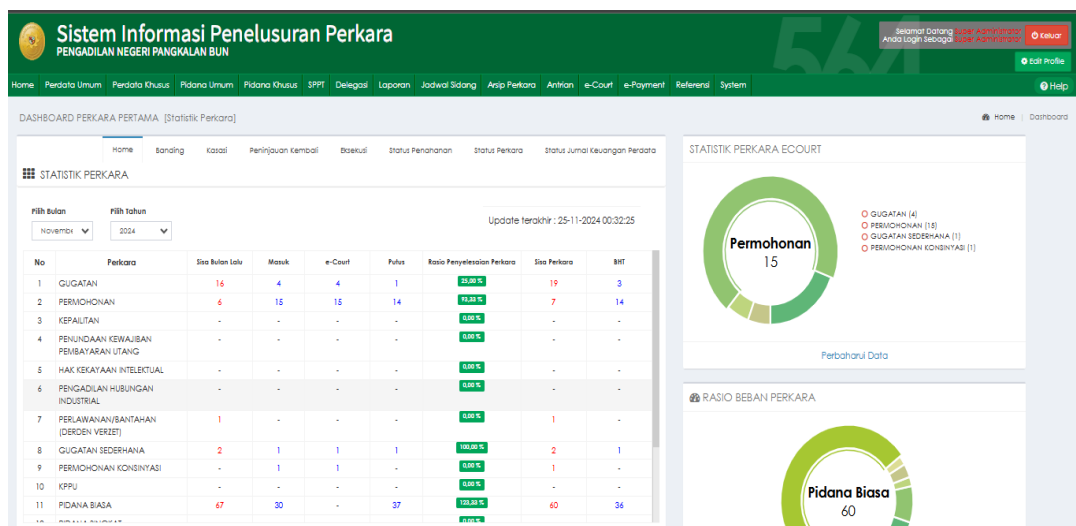
Dalam rangka mendorong kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik seperti yang telah diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang juga menjadi acuan dalam kompetisi ini adalah SK Ketua MA Nomor 026/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua MA Nomor 2-144/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka meningkat pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sera peningkatan kinerja bagi Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, maka perlu adanya Inovasi Pelayanan Publik.

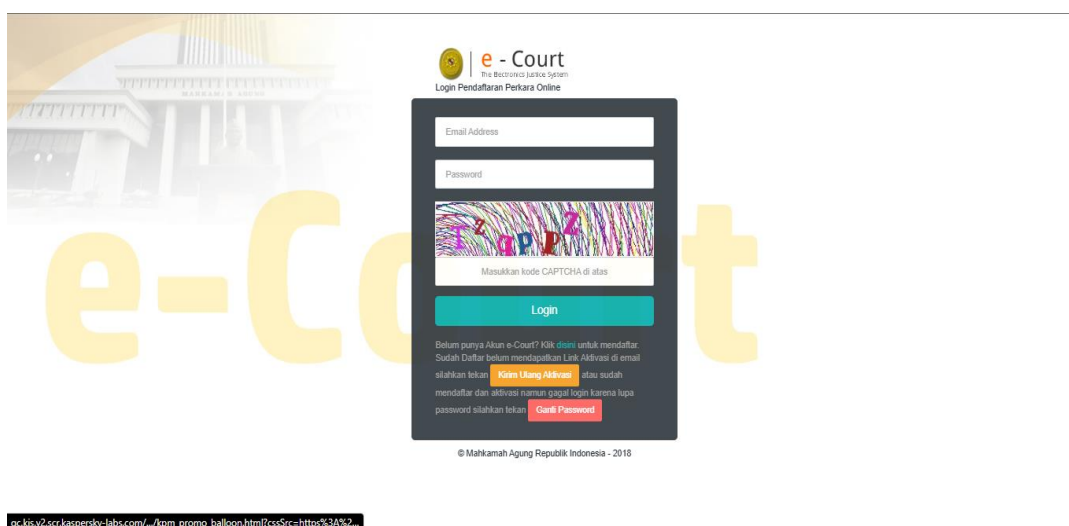
## 1. SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan untuk menelusuri proses suatu perkara. SIPP ini terdapat 2 versi yaitu SIPP yang hanya diperuntukan Hakim dan Pegawai Pengadilan dan SIPP Umum dengan alamat <https://sipp.pn-pangkalanbun.go.id/> yang diperuntukan untuk masyarakat. Dengan adanya SIPP ini, masyarakat akan lebih mudah mengetahui informasi proses suatu perkara.



## 2. e-Court

*e-Court* adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan secara online. Aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam menerima pendaftaran secara online sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. *Court* merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.



### 3. E-Berpadu

Elektornik Berkas Pidana Terpadu adalah integrasi berkas pidana antar penegak hukum untuk layanan permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana elektronik, permohonan penetapan diversi, izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.



#### 4. Pojok *e-Court*

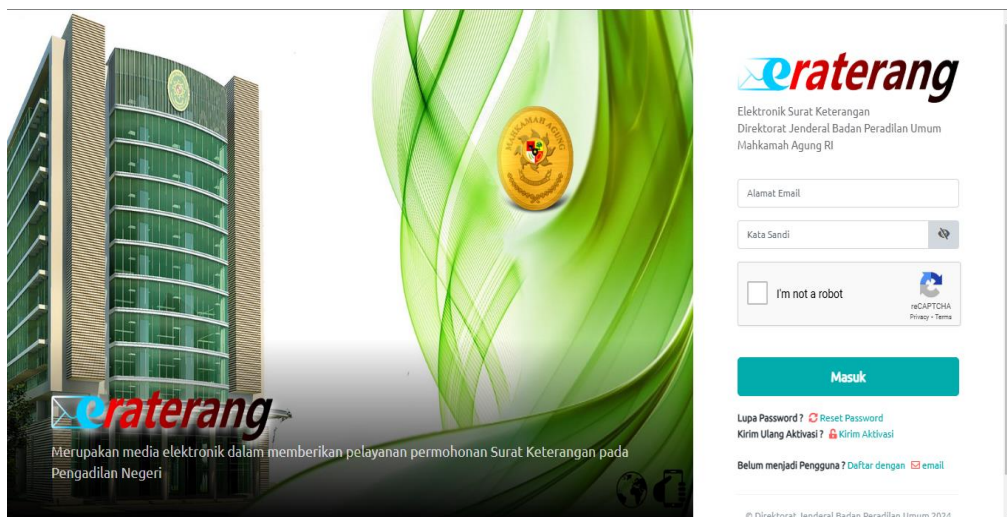
Pojok *e-Court* merupakan fasilitas yang disediakan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk membantu para pihak berpekarra yang ini memanfaatkan layanan administrasi perkara secara elektronik. Layanan ini berada pada aera PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Petugas Pojok *e-Court* bukan saja menerikan penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan hal-hal lainnya mengenai *e-Court*. Selain itu juga dapat membantu mendaftarkan akun pada *e-Court* dan memanfu cara pendaftaran perkara melalui *e-Court*.



#### 5. Eraterang

Layanan yang dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan, sekaligus untuk menghindari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menerapkan aplikasi eraterang. Dengan demikian masyarakat bisa dengan mudah membuat permohonan surat keterangan dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk dapat diupload pada aplikasi eraterang. Surat yang bisa dilayani melalu aplikasi eraterang diantaranya adalah surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, tidak pernah sebagai terpidana, tidak sedang dicabut hak pilihnya, surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan, atau alasan politik maupun surat keterangan tidak memiliki tanggungan

utang secara perorangan maupun badan hukum. Eraterang beralamat di [eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id](http://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id).



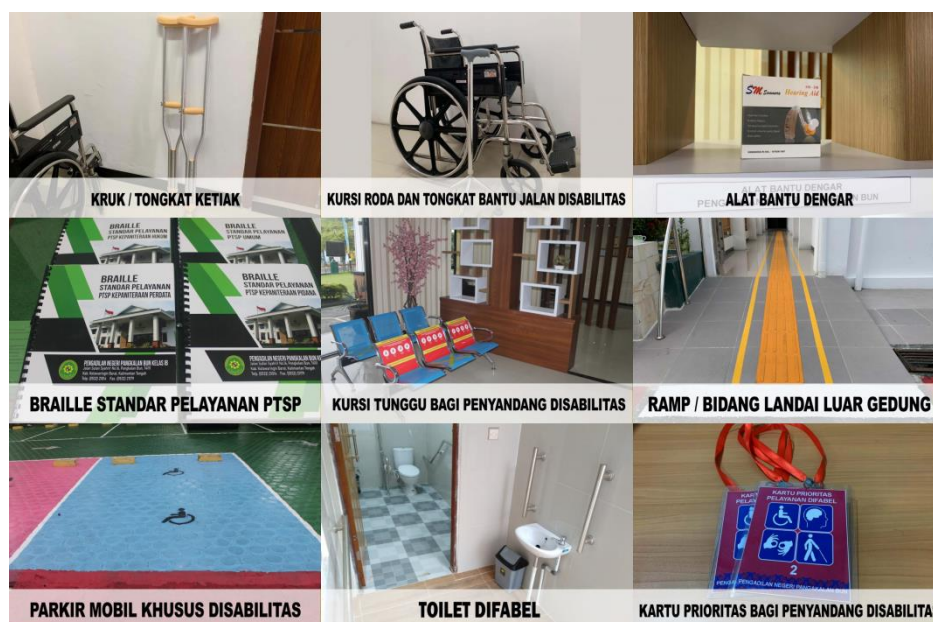
## 6. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan ruang yang disediakan oleh setiap Pengadilan Negeri bagi advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk mengisi formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa advokat. Advokat Piket adalah advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturang yang diatur di dalam kerjasama kelembagaan Pengadilan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.

## 7. Layanan Khusus Penyandang Disabilitas

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyiapkan fasilitas khusus untuk para penyandang disabilitas. Fasilitas ini disiapkan untuk memudahkan difabel selama berada di Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Kemudahan bagi difabel sudah ada sejak tempat turun penumpang (*drop zone*). Untuk penyandang disabilitas diberikan tempat khusus parkir kendaraan yang diberi tanda warna biru. Kemudian disediakan juga *guidling block* dan *warning block* untuk menuju ruang PTSP maupun ruang sidang.

Pada ruang PTSP dan Ruang Sidang disediakan tempat khusus bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Selain itu untuk juga disediakan toilet disabilitas sehingga memudahkan para penyandang disabilitas untuk mendapat akses ke toilet. Disamping itu, disediakan juga fasilitas pendukung seperti kursi roda, tongkat jalan, walker, buku braille, dan alat bantu dengar.



## 8. Protokol Persidangan

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai petugas sidang yang memang ditunjuk dan bertugas mengurus protokol persidangan. Petugas sidang ini bukan hanya sekedar menjadi petugas yang mengikat Kitab Suci untuk saksi yang bersumpah, akan tetapi justru harus diberi

peran besar untuk mengkoordinir jadwal sidang dan mengatur kelancaran jadwal sidang dengan memastikan kehadiran para pihak.



## 9. Aplikasi Pemanggilan Persidangan

Aplikasi ini berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi suara sehingga bisa membuat pengumuman panggilan sidang yang akan diperkeras melalui speaker di ruang tempat pengunjung.



## 10. Pengumuman Denda Tilang

Aplikasi yang membantu untuk melakukan pencarian denda tilang secara online pada website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sehingga bisa diakses dimana saja. Pengumuman Denda tilang Online dapat diakses dengan alamat [tilang.pn-pangkalanbun.go.id](http://tilang.pn-pangkalanbun.go.id).

INFORMASI PERKARA LALU LINTAS (TILANG)  
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

**Data Tilang Berdasarkan Tanggal Sidang**

Pilih Tanggal Sidang Perkara Lalu Lintas (TILANG), Kemudian Klik Tampilkan Data  
Catat Nomor Urut dan Jumlah Denda + Biaya Perkara

Tampilkan Data

Data Perkara Lalu Lintas (TILANG) Pada Tanggal 2024-11-26 dengan jumlah sebanyak 0 perkara, Silahkan dicatat Nomor Urut dan Jumlah Denda + Biaya Perkara

Show 10 rows Print

**PERHATIAN**

Pengambilan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas dilakukan di KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT dan/atau KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA setelah membayar denda di Bank BRI

Apabila Nama Anda Tidak Tercantum pada Pengumuman, Silahkan menghubungi SATLANTAS POLRES setempat

No	Nama Pelanggar	Tanggal Sidang	Nomor Perkara	Nomor Polisi	Nomor Resi	Jumlah Denda	Biaya Perkara
Data tidak ditemukan							
Menampilkan 0 s/d 0 dari 0 data							

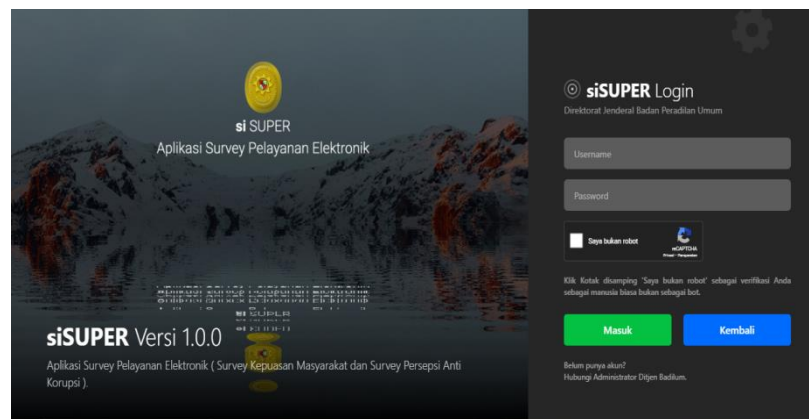
## 11. Sidang di Luar Gedung Pengadilan (*Zetting Plaatz*)

Sidang Pengadilan yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi, dan biaya.



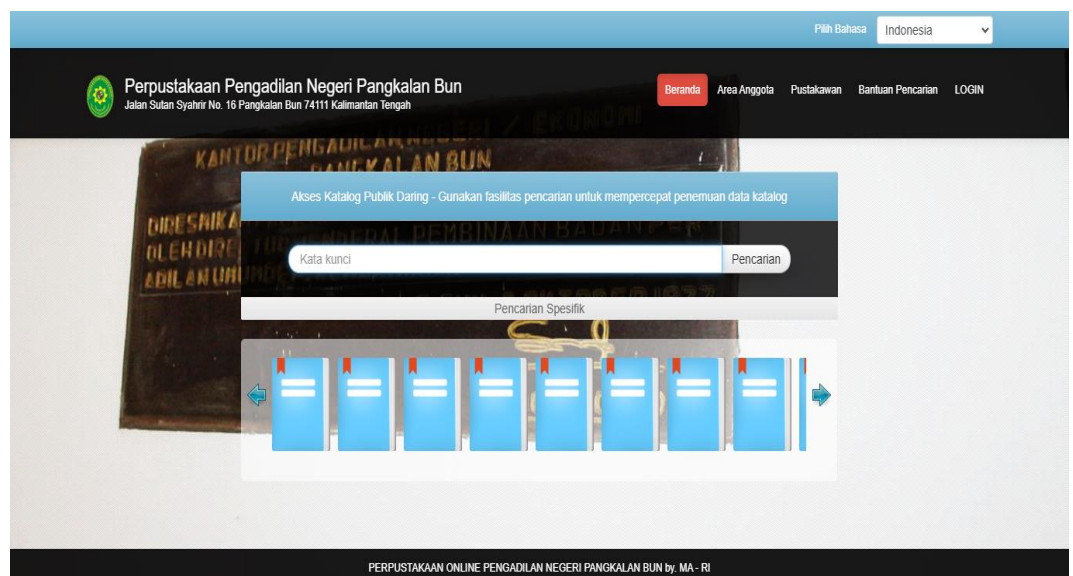
## 12. Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online

Aplikasi yang membantu pengguna layanan untuk melakukan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Petugas PTSP. Pengguna Layanan dapat langsung melakukan survey secara online melalui perangkat Kiosk yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



## 13. Aplikasi Perpustakaan Online

Aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan buku perpustakaan mulai dari arsip, peminjaman buku atau pengembalian buku secara elektronik. Aplikasi ini dikelola oleh Petugas Pustakawan yang mengimput ke dalam sistem.



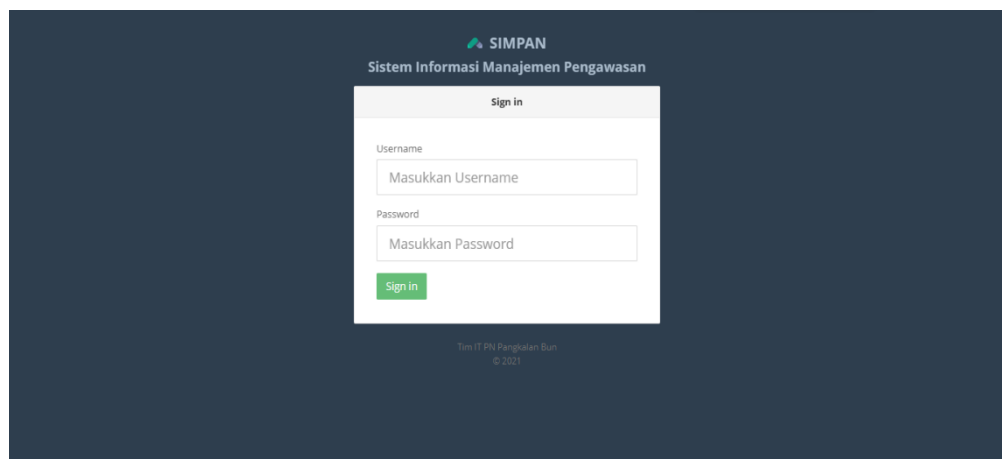
#### 14. Assisten Virtual Informasi dan Layanan (AVILA)

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terus memberikan layanan informasi kepada masyarakat melalui Assisten Virtual yang terhubung dengan whatsapp yang dikelola oleh petugas layanan PTSP. Hal tersebut dilakukan karena aplikasi whatsapp yang sangat mudah untuk dijangkau dan dioperasikan oleh pengguna. Pencari Keadilan dapat mengakses Assistant Virtual melalui website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



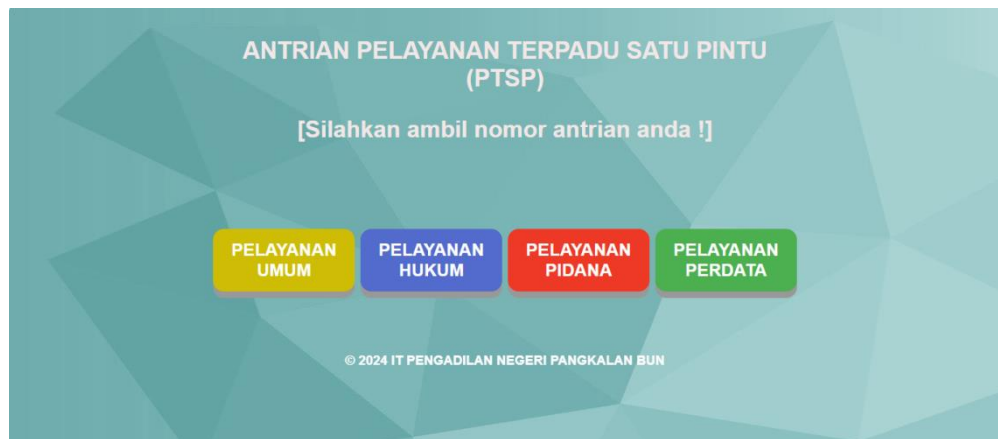
#### 15. SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan)

Aplikasi SIMPAN atau Sistem Informasi Manajemen Pengawasan adalah Aplikasi Manajemen arsip dan monitoring laporan pengawas secara elektronik mulai dari Pengawasan Bidang, Audit Internal, dan Audit Eksternal yang terdiri dari Pengawasan Tingkat Banding maupun Bawas. Sehingga dengan aplikasi ini dapat melihat apakah laporan pengawasan sudah ditindaklanjuti atau belum.



## 16. Antrian PTSP

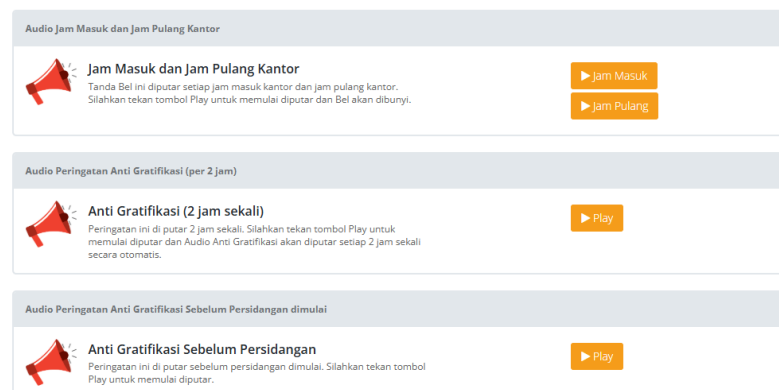
Aplikasi Antrian PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah aplikasi antrian buat pengunjung para pencari keadilan yang berkepentingan terkait dengan bagian meja huku, perdata, pidana, dan umum. Masyarakat atau pengguna layanan yang dapat mengambil nomor antrian pada *computer touchscreen* yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kemudian dapat munggu sampai nomor antrian dipanggil.



## 17. Audio Anti Gratifikasi

Aplikasi Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu petugas pengadilan didalam melaksanakan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon. Aplikasi ini berfungsi untuk mengumumkan dan memberitahukan kepada pengunjung bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan Wilayah Anti Gratifikasi dan telah mendapat Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi.

Automatic Audio Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



### 18. PTSP Online

Merupakan pelayanan PTSP secara online berbasis video conference via whatsapp sehingga dapat diakses oleh masyarakat dari mana saja.



### 19. Posbakum Online

Layanan Posbakum Online adalah Layanan menggunakan *video call* aplikasi Whatsapp agar lebih mudah diakses oleh para pengguna layanan/para pencari keadilan pada pengadilan negeri pangkalan bun. Pengguna layanan Posbakum dapat menghubungi nomor AVILA (Asisten Virtual Informasi dan Pelayanan) yang akan langsung terhubung dengan petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan selanjutnya akan diteruskan kepada petugas Posbakum pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



## BAB VI

### PENGAWASAN

#### A. Internal

Dalam melaksanakan pengawasan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah pengawasan melekat dimana serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian terus menerus dilakukan oleh Atasan Langsung terhadap Bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB selaku Penanggungjawab, dibantu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB bersama Panitera dan Sektetaris, bersama-sama sebagai pimpinan dalam melaksanakan pengawasan fungsional dan melekat secara internal, setiap saat melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas dan Perilaku Hakim dan Pegawai. Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun meliputi :

- Pengawasan Hakim Pengawas Bidang, mengacu pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 231/KPN.W16-U3/SK.PW1.1.1/XI/2025 tentang Penunjukan dan Penugasan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ;

NO	NAMA PENGAWAS BIDANG	JABATAN	PENGAWAS
1.	Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan Bidang Kepaniteraan dan Bidang Kesekretariatan
2	Erwin Tri Surya Anandar,	Hakim	Hakim Pengawas Bidang

	S.H., M.H.		Kepaniteraan Pidana
<b>3</b>	Mufti Muhammad, S.H.	Hakim	
<b>4</b>	Edi Rahmad, S.H., M.Kn.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata
<b>5</b>	Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.	Hakim	
<b>6</b>	Muhammad Cakranegara, S.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum
<b>7</b>	Febdhy Setyana, S.H., M.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Subbagian Umum dan Keuangan
<b>8</b>	Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
<b>9</b>	Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
<b>10</b>	Imam Setyawan, S.H.	Hakim	
<b>11</b>	Pungky Wibowo, S.H., M.H	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- Pembinaan dan Pengawasan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Kepaniteraan.
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Kesekretariatan.
- Monitoring dan Evaluasi SOP.
- Monitoring dan Evaluasi Bidang.
- Monitoring dan Evaluasi Uraian Tugas pada masing-masing bagian.
- Monitoring dan Evaluasi kegiatan pada masing-masing tim yang telah dibentuk oleh Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun meliputi ;
  - a) Monitoring dan Evaluasi Manajemen Resiko.
  - b) Monitoring dan Evaluasi Pengaduan.
  - c) Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan.
  - d) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

- e) Monitoring dan Evaluasi SPPT-TI.
- f) Monitoring dan Evaluasi SIPP. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Website.

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Delegasi.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi.
- Monitoring dan Evaluasi Panjar Biaya Perkara.
- Monitoring dan Evaluasi Perma No. 6 Tahun 2022 serta Perma No. 1,2, dan 3 Tahun 2022.
- Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Pengadilan.
- KIMWASMAT (Pengawasan dan Pengamatan)

Dilaksanakan pada Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Pangkalan Bun dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kabupaten Sukamara.

## B. Evaluasi

Evaluasi Eksternal dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Pengawas Reguler Daerah. Pelaksanaan Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Juni 2025-26 Oktober Juni 2025.

NO	TANGGAL PENGAWASAN	SUSUSNAN TIM PENGAWAS
1.	23 Juni 2025-26 Juni 2025	1. Heru Budyanto, S.H., M.H. 2. Apridius S.E., S.H., M.Si. 3. Anry Widy Laksini, S.H., M.H. 4. Yudi Yusliannoor, S.H. 5. Ginta Murli, S.E

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 sebagaimana disampaikan dapat memberikan gambaran secara umum tentang keadaan pelaksanaan tugas dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, antara lain :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
2. Percepatan penyelesaian perkara telah dilaksanakan secara maksimal meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis.
3. Keterbukaan informasi dan pelayanan publik telah diupayakan secara baik didukung dengan inovasi-inovasi pelayanan public yang telah dikembangkan dan diterapkan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
4. Pembinaan dan Pengawasan Internal pada masing-masing bagian telah dilaksanakan dengan baik dan terus-menerus.
5. Pelaksanaan anggaran dan administrasi telah dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA serta telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi berkala sehingga presentasi realisasi tahun 2025 meningkat dari tahun sebelumnya.
6. Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan serta menunjang kompetensi sumber daya manusia bagi hakim dan pegawai masih sangat diperlukan. Hal ini untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan bagi masyarakat dimana diperlukan tenaga kerja yang professional.

#### **B. Rekomendasi**

1. Bidang Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB sangat kekurangan pegawai untuk Staf Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga sangat direkomendasikan untuk menambah jumlah pegawai.
2. Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia dipandang perlu dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, pembinaan,

dan lain-lain. Kesempatan demikian dibutuhkan oleh Seluruh Hakim dan Pegawai, mengingat perkembangan Regulasi Mahkamah Agung terus berkembang serta banyaknya inovasi-inovasi baru dari Mahkamah Agung yang sudah mengimplementasikan teknologi informasi, maka dibutuhkan bimbingan untuk memahami dan mengimplementasikannya.

3. Guna menunjang tugas pokok dan fungsi satuan kerja, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun saat ini masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana seperti mobil dinas, laptop, printer, scanner, mebeleur kantor, ruang berkas perkara, AC ruang sidang utama dan perangkat foto/video editing.
4. Perlu adanya anggaran untuk rehabilitasi Gedung Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengingat semakin berkembangnya standar pelayanan peradilan dan ruangan penunjang juga semakin bertambah, maka dari itu perlu adanya rehabilitasi gedung agar bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bisa sesuai dengan standar *Prototipe* Mahkamah Agung RI.